

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGELUARAN 2012-2016



<https://kaltim.bps.go.id>



*Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur*

**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
MENURUT PENGELUARAN
2012-2016**



**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
MENURUT PENGELUARAN
2012-2016**

ISSN :978-623-7693-00-0
Nomor Publikasi :64550.1705
Katalog BPS :9302023.64

Ukuran Buku : 18,2 cm X 25,7 cm
Jumlah Halaman : xvi + 86 Halaman

Naskah:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Penyunting:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Desain Kover:

Bidang Neraca Wilayah dan Analisis Statistik

Diterbitkan Oleh:

©Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur

Dicetak Oleh:

CV. Mahendra

**Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau
menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa
izin tertulis dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Timur**

Tim Penyusun

PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENURUT PENGELUARAN 2012-2016

Pengarah :

M. Habibullah

Penanggung jawab :

Wembri Suska

Penyunting :

Wembri Suska

Yusniar Juliana Nababan

Penulis :

Nindia Indri Dirmayanti

Pengolah Data :

Nindia Indri Dirmayanti

Penyiapan Draft :

Nindia Indri Dirmayanti

Desain/Layout :

Nindia Indri Dirmayanti

KATA PENGANTAR

Buku Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur Menurut Pengeluaran Tahun 2012-2016 ini merupakan kelanjutan dari publikasi sebelumnya yang memuat dua perubahan yang sangat mendasar dari sisi metodologi. Pertama, angka PDRB yang ditampilkan pada publikasi ini menggunakan Tahun Dasar baru yaitu tahun 2010. Kedua, angka PDRB yang ditampilkan juga telah mengadopsi *System of National Account (SNA) 2008* meskipun belum secara menyeluruh.

Publikasi ini menyajikan tinjauan perkembangan perekonomian kabupaten/kota hanya di Kalimantan Timur (tanpa Kalimantan Utara) secara deskriptif. Di samping itu ditampilkan juga tabel pokok PDRB kabupaten/kota di Kalimantan Timur tahun 2012 – 2016 serta tabel turunannya, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Timur dalam berbagai bentuk sehingga dapat menerbitkan publikasi ini. Harapan kami, semoga publikasi ini bermanfaat bagi semua kalangan.

Samarinda , September 2017

Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur,



M. HABIBULLAH, S.Si, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
PENJELASAN TEKNIS	xiv
BAB I PENJELASAN UMUM	1
1.1. Pengertian Produk Domestik Regional Bruto	3
1.2. Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto	4
1.3. Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto	5
BAB II Metoda Estimasi dan Sumber Data	11
2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga	13
2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT	18
2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah	22
2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)	26
2.5 Perubahan Inventori	33
2.6 Ekspor dan Impor	39
BAB III TINJAUAN EKONOMI BERDASARKAN PDRB KABUPATEN-KOTA	43
3.1 Kontribusi PDRB Antar Kabupaten-Kota	45

3.2	Struktur Ekonomi Kabupaten-Kota	46
3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-Kota	48
3.4	Peranan Kabupaten-Kota Menurut Komponen	50
3.5	PDRB Perkapita	58
LAMPIRAN		63

<https://kaltim.bps.go.id>

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Share dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Menurut Kabupaten-Kota (persen), 2016	51
Gambar 3.2	Share Komponen Konsumsi Akhir Pemerintah Menurut Kabupaten-Kota (persen), 2015-2016	53
Gambar 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Komponen Konsumsi Akhir Pemerintah Menurut Kabupaten-Kota (persen), 2016 ..	54
Gambar 3.4	PDRB Perkapita dan Perkembangannya Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur (Juta Rp), 2016 ..	61

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB	8
Tabel 1.2	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010	9
Tabel 1.3	Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran Tahun Dasar 2000 dan 2010	10
Tabel 3.1	Kontribusi PDRB Kabupaten-Kota Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2012–2016 (persen)	45
Tabel 3.2	Tiga Komponen Dominan dalam Struktur Ekonomi Kabupaten-Kota Menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, Tahun 2016	48
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2012-2016 (persen)	49
Tabel 3.4	Share dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Komponen PMTB Menurut Kabupaten-Kota, Tahun 2015-2016 (persen) .	55
Tabel 3.5	Share Komponen Net Ekspor Menurut Kabupaten-Kota, Tahun 2015-2016 (persen)	58
Tabel 3.6	Perkembangan PDRB/Kapita Menurut Kabupaten-Kota, Tahun 2012-2016 (Juta Rupiah)	60

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten-Kota, Tahun 2012–2016 (juta rupiah)	65
Lampiran 2.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten-Kota, Tahun 2012–2016 (juta rupiah).....	65
Lampiran 3.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten-Kota, Tahun 2012–2016 (persen)	66
Lampiran 4.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten-Kota, Tahun 2012–2016 (persen)	66
Lampiran 5.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Paser	67
Lampiran 6.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Kabupaten Paser	67
Lampiran 7.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Paser ..	68
Lampiran 8.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Paser	68
Lampiran 9.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Kutai Barat	69
Lampiran 10.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Kabupaten Kutai Barat	69
Lampiran 11.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Kutai Barat	70

Lampiran 12.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Kutai Barat	70
Lampiran 13.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Kutai Kartanegara	71
Lampiran 14.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Kabupaten Kutai Kartanegara	71
Lampiran 15.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Kutai Kartanegara	72
Lampiran 16.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Kutai Kartanegara ..	72
Lampiran 17.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Kutai Timur	73
Lampiran 18.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Kabupaten Kutai Timur	73
Lampiran 19.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Kutai Timur	74
Lampiran 20.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Kutai Timur	74
Lampiran 21.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Berau	75
Lampiran 22.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Kabupaten Berau	75
Lampiran 23.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Berau ..	76
Lampiran 24.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Berau	76

Lampiran 25.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Penajam Paser Utara	77
Lampiran 26.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Kabupaten Penajam Paser Utara	77
Lampiran 27.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Penajam Paser Utara	78
Lampiran 28.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Penajam Paser Utara	78
Lampiran 29.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kabupaten Mahakam Ulu	79
Lampiran 30.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Kabupaten Mahakam Ulu .	79
Lampiran 31.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kabupaten Mahakam Ulu	80
Lampiran 32.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kabupaten Mahakam Ulu	80
Lampiran 33.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kota Balikpapan	81
Lampiran 34.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Kota Balikpapan	81
Lampiran 35.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kota Balikpapan ...	82
Lampiran 36.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kota Balikpapan	82
Lampiran 37.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kota Samarinda	83

Lampiran 38.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Kota Samarinda	83
Lampiran 39.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kota Samarinda	84
Lampiran 40.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kota Samarinda	84
Lampiran 41.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah) Kota Bontang	85
Lampiran 42.	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Juta Rupiah) Kota Bontang	85
Lampiran 43.	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 (Persen) Kota Bontang	86
Lampiran 44.	Distribusi Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (Persen) Kota Bontang	86

PENJELASAN TEKNIS

1. Penghitungan statistik neraca nasional yang digunakan di sini mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa yang dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional atau *System of National Account* (SNA) tahun 2008. Namun, penerapan statistik neraca nasional tersebut telah disesuaikan dengan kondisi sosial-ekonomi Indonesia.
2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tingkat regional (provinsi) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan output (nilai tambah) pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh lapangan usaha atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi penggunaan menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.
3. Penyajian PDRB menurut penggunaan dirinci menurut komponen penggunaan yang mencakup komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga, Konsumsi Akhir Lembaga Non Profit Rumah Tangga (LNPRT), Konsumsi Akhir Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), Perubahan Inventori, dan Net Ekspor (selisih antara Ekspor antar daerah dan impor antar daerah).
4. Produk Domestik Regional Bruto maupun agregat turunannya disajikan dalam 2 (dua) versi penilaian, yaitu atas dasar “harga berlaku” dan atas dasar “harga konstan”. Disebut sebagai harga berlaku karena seluruh agregat dinilai dengan menggunakan harga pada tahun berjalan, sedangkan harga konstan penilaiannya didasarkan kepada harga satu tahun dasar tertentu. Dalam publikasi di sini digunakan harga tahun 2010 sebagai dasar penilaian.
5. Laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari perhitungan PDRB atas dasar harga konstan. Laju pertumbuhan tersebut dihitung dengan cara mengurangi nilai PDRB pada tahun ke- n terhadap nilai pada tahun ke $n-1$ (tahun sebelumnya), dibagi dengan nilai pada tahun ke $n-1$, kemudian dikalikan

dengan 100 persen. Laju pertumbuhan menunjukkan perkembangan agregat pendapatan dari satu waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya.

6. **Harga Berlaku** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tahun sedang berjalan.
7. **Harga Konstan** adalah penilaian yang dilakukan terhadap produk barang dan jasa yang dihasilkan ataupun yang dikonsumsi pada harga tetap di satu tahun dasar.
8. **Tahun Dasar** adalah tahun terpilih sebagai referensi statistik, yang digunakan sebagai dasar penghitungan tahun-tahun yang lain. Dengan tahun dasar tersebut dapat digambarkan seri data dengan indikator rinci mengenai perubahan/pergerakan yang terjadi.



PENJELASAN UMUM

PPRB Kabupaten-Kota di Kalimantan Timur
Menurut Pengeluaran, 2012-2016



BAB I.

PENJELASAN UMUM

1.1 Pengertian Produk Domestik Regional Bruto

Perencanaan pembangunan ekonomi, memerlukan bermacam data statistik sebagai dasar berpijak dalam menentukan strategi kebijakan, agar sasaran pembangunan dapat dicapai dengan tepat. Strategi dan kebijakan yang telah diambil pada masa-masa lalu perlu dimonitor dan dievaluasi hasil-hasilnya. Berbagai data statistik yang bersifat kuantitatif diperlukan untuk memberikan gambaran tentang keadaan pada masa yang lalu dan masa kini, serta sasaran-sasaran yang akan dicapai pada masa yang akan datang.

Pada hakekatnya, pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas lapangan kerja, pemeratakan distribusi pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi regional dan melalui pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier. Dengan perkataan lain arah dari pembangunan ekonomi adalah mengusahakan agar pendapatan masyarakat naik, disertai dengan tingkat pemerataan yang sebaik mungkin.

Untuk mengetahui tingkat dan pertumbuhan pendapatan masyarakat, perlu disajikan statistik Pendapatan Nasional/Regional secara berkala, untuk digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan nasional atau regional khususnya di bidang ekonomi. Angka-angka pendapatan nasional/regional dapat dipakai juga sebagai bahan evaluasi dari hasil pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak, baik pemerintah pusat/daerah, maupun swasta.

Apa yang Dimaksud dengan PDRB?

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan nilai tambah bruto seluruh barang dan jasa yang tercipta atau dihasilkan di wilayah domestik suatu negara yang timbul akibat berbagai aktivitas ekonomi dalam suatu periode tertentu

tanpa memperhatikan apakah faktor produksi yang dimiliki residen atau non-residen. Penyusunan PDRB dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan yaitu pendekatan produksi, pengeluaran, dan pendapatan yang disajikan atas dasar harga berlaku dan harga konstan (riil).

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal disusun berdasarkan harga yang berlaku pada periode penghitungan, dan bertujuan untuk melihat struktur perekonomian. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan (riil) disusun berdasarkan harga pada tahun dasar dan bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi.

1.2 Kegunaan Produk Domestik Regional Bruto

Data pendapatan nasional adalah salah satu indikator makro yang dapat menunjukkan kondisi perekonomian nasional setiap tahun. Manfaat yang dapat diperoleh dari data ini antara lain adalah:

1. PDRB harga berlaku (nominal) menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah. Nilai PDRB yang besar menunjukkan kemampuan sumber daya ekonomi yang besar, begitu juga sebaliknya.
2. PDRB harga konstan (riil) dapat digunakan untuk menunjukkan laju pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan atau setiap kategori dari tahun ke tahun.
3. Distribusi PDRB harga berlaku menurut lapangan usaha menunjukkan struktur perekonomian atau peranan setiap kategori ekonomi dalam suatu wilayah. Kategori-kategori ekonomi yang mempunyai peran besar menunjukkan basis perekonomian suatu wilayah.
4. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDB dan PNB per satu orang penduduk.
5. PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu negara.

1.3 Perubahan Tahun Dasar Produk Domestik Regional Bruto

Selama sepuluh tahun terakhir, banyak perubahan yang terjadi pada tatanan global dan lokal yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional. Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008, penerapan perdagangan bebas antara China-ASEAN (CAFTA), perubahan sistem pencatatan perdagangan internasional dan meluasnya jasa layanan pasar modal merupakan contoh perubahan yang perlu diadaptasi dalam mekanisme pencatatan statistik nasional.

Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang tertuang dalam 2008 *System of National Accounts* (SNA 2008) melalui penyusunan kerangka *Supply and Use Tables* (SUT).

Perubahan tahun dasar PDB dilakukan secara bersamaan dengan penghitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi untuk menjaga konsistensi hasil penghitungan.

Apa yang Dimaksud SNA 2008?

SNA merupakan standar rekomendasi internasional tentang cara mengukur aktivitas ekonomi yang sesuai dengan penghitungan konvensional berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur *item* tertentu seperti PDRB.

SNA dirancang untuk menyediakan informasi tentang aktivitas pelaku ekonomi dalam hal produksi, konsumsi dan akumulasi harta dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan analisis, pengambilan keputusan, dan pembuatan kebijakan. Dengan menggunakan Kerangka SNA, fenomena ekonomi dapat dengan lebih baik dijelaskan dan dipahami.

Apa Manfaat Perubahan Tahun Dasar?

Manfaat perubahan tahun dasar PDRB antara lain :

- Menginformasikan perekonomian regional yang terkini seperti pergeseran struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Meningkatkan kualitas data PDRB;
- Menjadikan data PDRB dapat diperbandingkan secara internasional.

Apa Implikasi Perubahan Tahun Dasar?

Pergeseran harga tahun dasar akan memberikan beberapa dampak antara lain:

- Meningkatkan nominal PDRB, yang pada gilirannya akan berdampak pada pergeseran kelompok pendapatan suatu daerah dari pendapatan rendah, menjadi menengah, atau tinggi dan pergeseran struktur perekonomian;
- Akan merubah besaran indikator makro seperti rasio pajak, rasio hutang, rasio investasi dan saving, nilai neraca berjalan, struktur dan pertumbuhan ekonomi;
- Akan menyebabkan perubahan pada input data untuk *modeling* dan *forecasting*.

Mengapa Tahun 2010 sebagai tahun dasar?

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan perubahan tahun dasar secara berkala sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada tahun 1960, 1973, 1983, 1993, dan 2000. Tahun 2010 dipilih sebagai tahun dasar baru menggantikan tahun dasar 2000 karena beberapa alasan berikut:

- Perekonomian Indonesia tahun 2010 relatif stabil;

- Telah terjadi perubahan struktur ekonomi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir terutama dibidang informasi dan teknologi serta transportasi yang berpengaruh terhadap pola distribusi dan munculnya produk-produk baru;
- Rekomendasi PBB tentang pergantian tahun dasar dilakukan setiap 5 (lima) atau 10 (sepuluh) tahun¹;
- Adanya pembaharuan konsep, definisi, klasifikasi, cakupan, sumber data dan metodologi sesuai rekomendasi dalam SNA 2008;
- Tersedianya sumber data baru untuk perbaikan PDRB seperti data Sensus Penduduk 2010 (SP 2010) dan Indeks harga produsen (*Producers Price Index* /PPI);
- Tersedianya kerangka kerja SUT yang menggambarkan keseimbangan aliran produksi dan konsumsi (barang dan jasa) dan penciptaan pendapatan dari aktivitas produksi tersebut.

Implementasi SNA 2008 dalam PDRB tahun dasar 2010

Terdapat 118 revisi di SNA 2008 dari SNA sebelumnya dan 44 diantaranya merupakan revisi utama. Beberapa revisi yang diadopsi dalam penghitungan PDRB tahun dasar 2010 diantaranya:

- **Konsep dan Cakupan: Perlakuan *Work-in Progress* (WIP) pada *Cultivated Biological Resources* (CBR):**

Merupakan penyertaan pertumbuhan aset alam hasil budidaya manusia yang belum di panen sebagai bagian dari output lapangan usaha yang bersangkutan seperti: nilai tegakan padi yang belum di panen, nilai sapi perah yang belum menghasilkan, nilai pohon kelapa sawit atau karet yang belum berbuah/dipanen.

¹ SNA1993, para 16.76: "*constant price series should not be allowed to run for more than five, or at the most, ten years without rebasing*"

- **Metodologi** : Perbaikan metode penghitungan output bank dari *Imputed Bank Services Charge (IBSC)* menjadi *Financial Intermediation Services Indirectly Measured (FISIM)*
- **Valuasi** : Nilai tambah lapangan usaha dinilai dengan Harga Dasar (*Basic Price*).

Merupakan harga keekonomian barang dan jasa ditingkat produsen sebelum adanya intervensi pemerintah seperti pajak dan subsidi atas produk (harga dasar). Valuasi ini hanya untuk penghitungan PDB, sedangkan PDRB menggunakan harga produsen.

- **Klasifikasi** :

Klasifikasi yang digunakan berdasarkan *Internasional Standard Classification (ISIC rev.4)* dan *Central Product Classification (CPC rev.2)*. BPS mengadopsi kedua klasifikasi tersebut sebagai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2009 (KBLI 2009) dan Klasifikasi Baku Komoditi Indonesia 2010 (KBKI 2010).

Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode dari SNA sebelumnya dan SNA 2008 antara lain dijelaskan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1.
Perbandingan Perubahan Konsep dan Metode Perhitungan PDRB

Variabel	Konsep Lama	Konsep Baru
1. Output pertanian	Hanya mencakup output pada saat panen	Output saat panen ditambah nilai hewan dan tumbuhan yang belum menghasilkan
2. Metode penghitungan output bank komersial.	Menggunakan metode <i>Imputed Bank Services Charge (IBSC)</i> .	Menggunakan metode <i>Financial Intermediary Services Indirectly Measured (FISIM)</i>
3. Biaya eksplorasi mineral dan pembuatan produk original	Dicatat sebagai konsumsi antara	Dicatat sebagai output dan dikapitalisasi sebagai PMTB

Perubahan Klasifikasi dari PDRB Tahun Dasar 2000 ke PDRB Tahun Dasar 2010

Klasifikasi PDRB menurut lapangan usaha tahun dasar 2000 (2000=100) menggunakan Klasifikasi Lapangan Usaha Indonesia 1990 (KLUI 1990) sedangkan pada PDRB tahun dasar 2010 (2010=100) menggunakan KBLI 2009. Perbandingan keduanya pada tingkat paling agregat dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 1.2.
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB
Menurut Lapangan Usaha Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan
2. Pertambangan dan Penggalian	B. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan	C. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih	D. Pengadaan Listrik dan Gas
	E. Pengadaan Air
5. Konstruksi	F. Konstruksi
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
7. Pengangkutan dan Komunikasi	H. Transportasi dan Pergudangan
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum
8. Keuangan, Real estat, dan jasa perusahaan	J. Informasi dan Komunikasi
	K. Jasa Keuangan
	L. Real Estat
	M,N. Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib
	P. Jasa Pendidikan
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial
	R,S,T,U. Jasa Lainnya

Sementara klasifikasi PDRB menurut pengeluaran tahun dasar 2010 secara garis besar tidak banyak mengalami perubahan seperti tabel berikut :

Tabel 1.3.
Perbandingan Perubahan Klasifikasi PDRB Menurut Pengeluaran
Tahun Dasar 2000 dan 2010

PDRB Tahun Dasar 2000	PDRB Tahun Dasar 2010
1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga	1. Pengeluaran Konsumsi Rumahtangga
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT
3. Pembentukan Modal Tetap Bruto	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah
4. Perubahan Inventori	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto
5. Ekspor	5. Perubahan Inventori
6. Impor	6. Ekspor
	7. Impor



METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA



PPRB Kabupaten-Kota di Kalimantan Timur
Menurut Pengeluaran, 2012-2016

<https://kalim.bps.go.id>



BAB II.

METODA ESTIMASI DAN SUMBER DATA

Uraian yang disajikan dalam bab ini mencakup konsep definisi kategori dan subkategori pengeluaran, cara-cara perhitungan nilai kategori PDRB atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2010, serta sumber datanya.

2.1 Pengeluaran Konsumsi Akhir Rumah Tangga

i. Pendahuluan

Sektor rumah tangga mempunyai peran yang cukup besar dalam perekonomian Kalimantan Timur. Hal ini tercermin dari besarnya sumbangan konsumsi rumahtangga dalam pembentukan PDRB pengeluaran, yaitu lebih dari 15 persen. Di samping berperan sebagai konsumen akhir barang dan jasa, rumahtangga juga berperan sebagai produsen dan penyedia faktor produksi untuk aktivitas produksi yang dilakukan oleh sektor institusi lain.

ii. Konsep dan definisi

Pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PK-RT) adalah pengeluaran atas barang dan jasa oleh rumah tangga untuk tujuan konsumsi. Rumah tangga didefinisikan sebagai individu atau kelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu bangunan tempat tinggal. Mereka mengumpulkan pendapatan, dapat memiliki harta dan kewajiban, serta mengkonsumsi barang dan jasa secara bersama-sama, utamanya kelompok makanan dan perumahan.

iii. Cakupan

PK-RT mencakup seluruh pengeluaran atas barang dan jasa oleh residen suatu wilayah, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar wilayah domestik suatu *region*. Jenis-jenis barang dan jasa yang dikonsumsi diklasifikasikan menurut COICOP (*Classifications of Individual Consumption by Purpose*) seperti yang direkomendasikan oleh UN (United Nations), sbb:

1. Makanan dan minuman tidak beralkohol
2. Minuman beralkohol, tembakau dan narkotik
3. Pakaian dan alat kaki
4. Perumahan, air, listrik, gas dan bahan bakar lainnya
5. Furniture, perlengkapan rumahtangga dan pemeliharaan rutin
6. Kesehatan
7. Angkutan
8. Komunikasi
9. Rekreasi/hiburan dan kebudayaan
10. Pendidikan
11. Penyediaan makan minum dan penginapan/hotel
12. Barang dan jasa lainnya

Namun karena keterbatasan data, maka 12 COICOP tersebut dikelompokkan kembali menjadi hanya 7 COICOP, yaitu:

1. Makanan, Minuman, dan Rokok
2. Pakaian dan Alas Kaki
3. Perumahan, Perkakas, Perengkapan dan Penyelenggaraan Rumah Tangga
4. Kesehatan dan Pendidikan
5. Transportasi, Komunikasi, Rekreasi, dan Budaya

6. Hotel dan Restoran
7. Lainnya

Konsumsi rumah tangga mencakup juga hal-hal sbb:

- Imputasi jasa persewaan rumah milik sendiri (*owner occupied dwellings*);

Nilai perkiraan sewa rumah milik sendiri harus diperhitungkan karena rumah tangga pemilik, dianggap menghasilkan jasa persewaan rumah bagi dirinya sendiri. Imputasi sewa rumah diperkirakan atas dasar harga pasar, meskipun status rumah tersebut milik sendiri. Apabila rumah tangga benar-benar menyewa, maka yang dihitung adalah biaya sewa yang dibayar, baik dibayar penuh maupun tidak penuh karena mendapat keringanan biaya (subsidi atau transfer).

- Barang yang diproduksi dan digunakan sendiri;
- Pemberian/hadiah dalam bentuk barang yang diterima dari pihak lain;
- Barang dan jasa yang dibeli langsung (*direct purchase*) oleh residen diluar wilayah atau diluar negeri (diperlakukan sebagai impor)

Terdapat beberapa catatan yang perlu diketahui berkaitan dengan PK-RT ini, yaitu:

- Pembelian langsung oleh non-residen, diperlakukan sebagai ekspor dari wilayah tersebut.
- Pembelian barang yang tidak diproduksi kembali (tidak diduplikasi), seperti barang antik, lukisan, dan hasil karya seni lainnya diperlakukan sebagai investasi atas barang berharga, bukan konsumsi rumah tangga.

- Pengeluaran rumah tangga untuk keperluan biaya antara dan pembentukan modal di dalam aktivitas usaha rumah tangga, tidak termasuk dalam pengeluaran konsumsi rumah tangga. Contoh, pembelian barang dan jasa untuk keperluan usaha, perbaikan besar rumah, dan pembelian rumah.
- Pengeluaran untuk keperluan transfer baik dalam bentuk uang atau barang, tidak termasuk sebagai pengeluaran konsumsi rumah tangga.

iv. Penghitungan PK-RT Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk mengestimasi PKRT adalah:

- Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS, dalam bentuk pengeluaran konsumsi per kapita seminggu untuk makanan, dan pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan,
- Jumlah penduduk pertengahan tahun,
- Data sekunder (dari BPS maupun dari luar BPS), dalam bentuk data atau indikator suplai komoditas dan jenis pengeluaran tertentu,
- Indeks Harga Konsumen (IHK).

2. Metode penghitungan

Penghitungan PK-RT didasarkan pada hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Untuk menghasilkan perhitungan PK-RT yang mencerminkan kondisi sesungguhnya, masih diperlukan adanya beberapa penyesuaian (*adjustment*). Penyesuaian dilakukan dengan menggunakan data

pendukung (data sekunder) dalam bentuk indikator suplai (di luar Susenas) dari beberapa komoditi tertentu. Hasil penghitungan dari data sekunder tersebut dianggap lebih mencerminkan PK-RT yang sebenarnya. Penyesuaian (*adjustment*) yang dilakukan adalah mengganti hasil Susenas dengan hasil penghitungan yang didasarkan data indikator suplai untuk beberapa komoditas. Penggantian dilakukan pada level komoditas, kelompok komoditas, atau jenis pengeluaran tertentu.

Langkah penghitungan di atas menghasilkan besarnya PK-RT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-RT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara *mendeflate* PK-RT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

Untuk lebih jelasnya, langkah langkah penghitungan PK-RT dapat diringkas sbb:

1. Estimasi PK-RT hasil Susenas:
 - a. Makanan = pengeluaran konsumsi perkapita seminggu x (30/7) x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
 - b. Bukan makanan = pengeluaran konsumsi perkapita sebulan x 12 x jumlah penduduk pertengahan tahun
2. Terhadap data poin ke 1 dilakukan koreksi dengan menggunakan data sekunder atau indikator suplai komoditas untuk jenis pengeluaran tertentu;
3. Data poin ke 2 dikelompokkan menjadi 7 kelompok COICOP ;
4. Diperoleh nilai PK-RT tahun 2010 yang telah di-*adjust*;
5. Susun Indeks Implisit berdasarkan IHK Kota (Provinsi/Kota terdekat) dengan 7 kelompok COICOP;
6. PK-RT atas dasar harga konstan 2010 diperoleh dengan membagi hasil poin ke 4 dengan hasil poin ke 5.

2.2 Pengeluaran Konsumsi Akhir LNPRT

i Pendahuluan

Sektor Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) muncul sebagai sektor tersendiri dalam suatu perekonomian wilayah. Sektor ini berperan dalam menyediakan barang dan jasa bagi anggotanya maupun bagi rumahtangga secara gratis atau pada tingkat harga yang tidak berarti secara ekonomi. Harga yang tak berarti secara ekonomi artinya harga tersebut biasanya dibawah harga pasar (tidak mengikuti harga pasar yang berlaku).

ii Konsep dan definisi

LNPRT merupakan bagian dari lembaga non profit (LNP). Sesuai dengan fungsinya, LNP dibedakan atas LNP yang melayani rumah tangga dan LNP yang melayani bukan rumahtangga.

Karakteristik unit LNP adalah sbb:

- LNP umumnya adalah lembaga formal, tetapi terkadang merupakan lembaga informal yang keberadaannya diakui oleh masyarakat;
- pengawasan terhadap jalannya organisasi dilakukan oleh anggota terpilih yang punya hak sama, termasuk hak bicara atas keputusan lembaga;
- setiap anggota mempunyai tanggung jawab tertentu dalam organisasi, dan tidak berhak menguasai *profit* atau surplus, karena *profit* yang diperoleh dari kegiatan usaha produktif dikuasai oleh lembaga;
- kebijaksanaan lembaga diputuskan secara kolektif oleh anggota terpilih, dan kelompok ini berfungsi sebagai pelaksana dari dewan

pengurus; dan

- istilah *nonprofit* tidak berarti bahwa lembaga ini tidak dapat menciptakan surplus melalui kegiatan produktifnya, namun surplus yang diperoleh biasanya diinvestasikan kembali pada aktivitas sejenis.

LNPRT merupakan lembaga yang melayani anggotanya atau rumahtangga, serta tidak dikontrol oleh pemerintah. Anggota dari lembaga yang dimaksud disini adalah yang bukan berbentuk badan usaha. LNPRT dibedakan atas 7 jenis lembaga, yaitu: Organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi profesi, perkumpulan sosial/ kebudayaan/olahraga/ hobi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), lembaga keagamaan, dan organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa.

iii. Cakupan

Nilai PK-LNPRT sama dengan nilai output non-pasar yang dihasilkan LNPRT. Nilai output non pasartersebut dihitung berdasarkan nilai seluruh pengeluaran LNPRT dalam rangka melakukan kegiatan operasionalnya. Pengeluaran yang dimaksud terdiri dari :

- a. Konsumsi antara, contoh : pembelian alat tulis, barang cetakan, pembayaran listrik, air, telepon, teleks, faksimili, biaya rapat, seminar, perjamuan, transportasi, bahan bakar, perjalanan dinas, belanja barang dan jasa lain, sewa gedung, sewa perlengkapan kantor dll.
- b. Kompensasi tenaga kerja, contoh : upah, gaji, lembur, honor, bonus dan tunjangan lainnya

- c. Penyusutan
- d. Pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi), contoh: PBB, STNK, BBN dll.

iv. Penghitungan PK-LNPRT Tahunan

1. Sumber data

- Hasil Survei Khusus Lembaga Non-profit (SK-LNP).
Informasi yang diperoleh dari hasil SKLNP adalah rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran.
- Hasil *up-dating* direktori LNPRT.
Informasi yang diperoleh dari hasil *up-dating* direktori LNPRT adalah jumlah populasi LNPRT menurut jenis lembaga.
- Indeks Harga Konsumen (IHK)

2. Metode penghitungan

PK-LNPRT diestimasi dengan menggunakan metode langsung, yaitu menggunakan hasil SKLNP. Tahapan estimasi PK-LNPRT adalah sebagai berikut:

- Menghitung rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran (barang dan jasa). Barang dan jasa yang diperoleh secara cuma-cuma, nilainya diperkirakan sesuai harga pasar yang berlaku. Rata-rata pengeluaran lembaga menurut jenisnya dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\bar{x}_{ij} = \frac{x_{ij}}{n_i}$$

\bar{x}_{ij} : Rata-rata pengeluaran menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

x_{ij} : PK-LNPRT hasil survei menurut jenis lembaga dan jenis pengeluaran

n_i : Jumlah sampel LNPRT menurut jenis lembaga

i : Jenis lembaga LNPRT, $i = 1, 2, 3, \dots, 7$

j : jenis pengeluaran LNPRT, $j = 1, 2, 3, \dots, 19$

- Mengestimasi PK-LNPRT, dengan menggunakan rumusan sebagai berikut:

$$X = \sum_{i=1}^7 \sum_{j=1}^{19} \bar{x}_{ij} \times N_i$$

X : PK-LNPRT adh berlaku

N_i : Populasi LNPRT menurut jenis lembaga

Hasil penghitungan di atas akan diperoleh besarnya PK-LNPRT atas dasar harga berlaku (ADHB). PK-LNPRT atas dasar harga konstan (ADHK) 2010, diperoleh dengan cara mendeflate PK-LNPRT ADHB dengan IHK tahun dasar 2010.

2.3 Pengeluaran Konsumsi Akhir Pemerintah

i. Pendahuluan

Unit pemerintah adalah unit institusi yang dibentuk melalui proses politik, serta mempunyai kekuasaan di bidang lembaga legislatif, yudikatif maupun eksekutif atas unit institusi lain yang berada di dalam batas-batas wilayah suatu negara/wilayah. Pemerintah juga mempunyai berbagai peran dan fungsi lainnya, seperti sebagai penyedia barang dan jasa bagi kelompok atau individu rumah tangga, sebagai pemungut dan pengelola pajak atau pendapatan lain-nya, berfungsi mendistribusikan pendapatan atau kesejahteraan melalui aktivitas transfer, serta terlibat di dalam produksi non-pasar.

Dalam suatu perekonomian, unit pemerintah bisa berperan sebagai konsumen maupun produsen, serta sebagai regulator yang menetapkan berbagai kebijakan di bidang fiskal dan moneter. Sebagai konsumen, pemerintah akan melakukan aktivitas konsumsi atas barang dan jasa akhir. Sedangkan sebagai produsen, pemerintah akan melakukan aktivitas memproduksi barang & jasa maupun aktivitas investasi.

ii. Konsep dan Definisi

Besarnya nilai pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) sama dengan nilai produksi barang dan jasa yang dihasilkan pemerintah untuk dikonsumsi pemerintah itu sendiri. PK-P mencakup pembelian barang dan jasa yang bersifat rutin, pembayaran upah dan gaji pegawai, transfer sosial dalam bentuk barang, perkiraan penyusutan barang modal, dan nilai output dari Bank Indonesia, dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa yang dihasilkan unit produksi yang tak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan.

Aktivitas unit produksi pemerintah yang tidak dapat dipisahkan dari aktivitas pemerintahan secara umum, mencakup kegiatan sebagai berikut:

1. memproduksi barang yang sama atau sejenis dengan barang yang diproduksi oleh perusahaan. Contoh: aktivitas pencetakan publikasi, kartu pos, reproduksi karya seni, pembibitan tanaman di kebun percobaan dsb. Aktivitas menjual barang-barang semacam itu bersifat insidental dari fungsi pokok unit pemerintah.
2. Memproduksi jasa. Contoh: aktivitas penyelenggaraan rumah sakit, sekolah, perguruan tinggi, museum, perpustakaan, tempat rekreasi dan penyimpanan hasil karya seni yang dibiayai oleh pemerintah. Dalam hal ini pemerintah memungut biaya yang umumnya tidak lebih dari seluruh biaya yang dikeluarkan. Pendapatan yang diterima dari aktivitas semacam ini disebut sebagai penerimaan non komoditi (pendapatan jasa).

iii. Cakupan

Sektor pemerintahan terdiri dari Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah. Dalam melakukan aktivitasnya, unit pemerintah pusat akan mengacu pada dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sedangkan unit pemerintah daerah (baik Provinsi, Kabupaten/Kota, maupun Desa) mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintah Daerah (APBD).

Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah (PK-P) Provinsi mencakup : a. PK-Pemerintah Kabupaten/Kota yang berada di wilayah provinsi; b. PK-Pemerintah Provinsi yang bersangkutan; c. PK-Pemerintah Pusat yang merupakan bagian dari pemerintah Provinsi; d. PK-Pemerintah Desa/Kelurahan/Nagari yang ada di wilayah Provinsi bersangkutan.

iv. Penghitungan PDRB Tahunan

1. Sumber Data

Data dasar yang digunakan untuk menghitung PK-P Provinsi Tahunan adalah:

- a. Data realisasi APBN Tahunan (Kemenkeu)
- b. Data realisasi APBD Tahunan (Kemenkeu)
- c. Statistik Keuangan Daerah (BPS)
- d. Output Bank Indonesia (BI)
- e. Gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS) dari Kementerian Keuangan serta Indeks Harga dari BPS.

2. Metode Penghitungan

a. PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku

Secara umum, PK-P atas dasar harga berlaku dihitung menggunakan rumusan berikut:

$$\text{PK-P ADHB} = \text{Output non pasar-penjualan barangdan jasa} + \text{output Bank Indonesia}$$

Output **non pasar dihitung** dengan pendekatan biaya yg dikeluarkan, yaitu : belanja pengadaan barang/jasa, bantuan sosial dalam bentuk barang (yang dibeli dengan harga pasar), belanja pegawai, dan penyusutan.

Untuk level Provinsi, PK-P Provinsi atas dasar harga berlaku, dihitung berdasarkan penjumlahan dari pengeluaran akhir konsumsi pemerintah Provinsi itu sendiri + pengeluaran akhir

konsumsi pemerintah seluruh pemerintahan Kabupaten/Kota yang ada di wilayah Provinsi tersebut + pengeluaran akhir seluruh pemerintah desa/kelurahan/nagari yang ada di wilayah provinsi tersebut + pengeluaran pemerintah Pusat yang menjadi bagian dari Provinsi yang bersangkutan.

b. PK-P Provinsi atas dasar harga konstan

Pengeluaran konsumsi pemerintah atas dasar harga konstan dihitung dengan menggunakan metode deflasi. Deflator yang digunakan adalah Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum tanpa ekspor, Indeks Upah, Indeks Implisit dari Produk Domestik Bruto komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto, Indeks Harga Konsumen (IHK) umum.

2.4 Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

i Pendahuluan

Aktivitas investasi merupakan salah satu faktor utama yang akan mempengaruhi perkembangan ekonomi suatu negara/wilayah. Investasi disini terdiri dari investasi fisik dan investasi finansial. Dalam konteks PDB/PDRB, aktivitas investasi fisik ini tercermin pada komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan Perubahan Inventori.

PMTB erat kaitannya dengan keberadaan aset tetap (*fixed asset*) yang dilibatkan dalam proses produksi. Secara garis besar aset tetap dapat diklasifikasi menurut jenis barang modal seperti: bangunan dan konstruksi lain, mesin dan perlengkapan, kendaraan, tumbuhan, ternak, dan barang modal lainnya.

ii Konsep dan definisi

PMTB didefinisikan sebagai penambahan dan pengurangan aset tetap pada suatu unit produksi, dalam kurun waktu tertentu. Penambahan barang modal mencakup pengadaan, pembuatan, pembelian, sewa beli (*financial leasing*) barang modal baru dari dalam negeri serta barang modal baru dan bekas dari luar negeri (termasuk perbaikan besar, transfer atau barter barang modal), dan pertumbuhan aset sumber daya hayati yang dibudidaya. Sedangkan pengurangan barang modal mencakup penjualan, transfer atau barter, dan sewa beli (*financial leasing*) barang modal bekas pada pihak lain. Pengecualian kehilangan yang disebabkan oleh bencana alam tidak dicatat sebagai pengurangan.

Barang modal mempunyai usia pakai lebih dari satu tahun, serta akan mengalami penyusutan sepanjang usia pakainya. Istilah "bruto"

mengindikasikan bahwa di dalamnya masih mengandung unsur penyusutan. Penyusutan atau konsumsi barang modal (*Consumption of Fixed Capital*) menggambarkan penurunan nilai barang modal yang digunakan dalam proses produksi secara normal selama satu periode.

iii Cakupan

PMTB terdiri dari:

1. Penambahan dikurangi pengurangan aset (harta) baik barang baru maupun barang bekas, seperti bangunan tempat tinggal, bangunan bukan tempat tinggal, bangunan lainnya, mesin & perlengkapan, alat transportasi, aset tumbuhan dan hewan yang dibudidaya (*cultivated asset*), produk kekayaan intelektual (*intellectual property products*), dan sebagainya;
2. Biaya alih kepemilikan aset non finansial yang tidak diproduksi, seperti lahan dan aset yang dipatenkan;
3. Perbaikan besar aset, yang bertujuan meningkatkan kapasitas produksi dan usia pakainya (seperti *overhaul* mesin produksi, reklamasi pantai, pembukaan, pengeringan dan pengairan hutan, serta pencegahan banjir dan erosi).

iv Penghitungan PMTB Tahunan

1. Sumber data
 - a. Output industri konstruksi hasil penghitungan PDRB menurut industri konstruksi dari BPS Prov/Kab/Kota.
 - b. Nilai impor 2 digit HS, yang merupakan barang modal impor

dari KPPBC (Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai) setempat.

- c. Indeks Produksi Industri Besar Sedang dari Statistik Industri Kecil & Rumah tangga (level provinsi).
- d. Laporan keuangan perusahaan.
- e. Publikasi Statistik Industri Besar dan Sedang level provinsi.
- f. IHPB dari Statistik Harga Perdagangan Besar.
- g. Publikasi Statistik Pertambangan dan Pengalihan (migas dan non-migas).
- h. Publikasi Statistik Listrik, Gas & Air Minum.
- i. Publikasi Statistik Konstruksi.
- j. Data Eksplorasi Mineral dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
- k. Statistik Peternakan, Ditjen Peternakan.

2. Metode penghitungan

Penghitungan PMTB dapat dilakukan melalui metode langsung maupun tidak langsung, tergantung pada ketersediaan data yang mungkin diperoleh di wilayah masing-masing. Pendekatan “langsung” adalah dengan cara menghitung pembentukan modal (harta tetap) yang dilakukan oleh berbagai sektor ekonomi (produsen) secara langsung. Sedangkan pendekatan “tidak langsung” adalah dengan menghitung berdasarkan alokasi dari total penyediaan produk (barang dan jasa) yang menjadi barang modal di berbagai industri, atau disebut sebagai pendekatan “arus komoditas”. Dalam hal ini

penyediaan atau “*supply*” dari barang modal dapat berasal dari produksi dalam negeri (domestik) maupun dari produk luar negeri (impor).

Pendekatan Langsung

Penghitungan PMTB secara langsung dilakukan dengan cara menjumlahkan seluruh nilai PMTB yang terjadi di setiap industri (lapangan usaha). Barang modal tersebut dinilai atas dasar harga pembelian, di dalamnya sudah termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan, seperti biaya transportasi, biaya instalasi, pajak-pajak, serta biaya lain yang terkait dengan pengadaan barang modal tersebut. Bagi barang modal yang berasal dari impor di dalamnya termasuk bea masuk dan pajak-pajak yang terkait dengan pengadaan atau alih kepemilikan barang modal tersebut.

Pada dasarnya data untuk penghitungan PMTB secara langsung dapat diperoleh dari laporan keuangan perusahaan. Data yang tersedia meliputi informasi/data tentang perubahan atas aset tetap (PMTB) yang dinilai atas dasar harga berlaku atau harga pembelian (perolehan). Untuk memperoleh nilai PMTB atas dasar harga konstan, maka PMTB atas dasar harga berlaku tersebut di “*deflate*” (dibagi) dengan indeks harga perdagangan besar (IHPB) yang sesuai dengan kelompok barang modal.

Pendekatan Tidak Langsung

Penghitungan PMTB dengan cara tidak langsung, disebut sebagai pendekatan arus komoditas (*commodity flow approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara menghitung nilai penyediaan produk barang yang dihasilkan oleh berbagai industri (*supply*), yang kemudian sebagian di antaranya dialokasi menjadi barang modal. Penghitungan PMTB dalam bentuk bangunan, dilakukan dengan menggunakan rasio tertentu dari nilai

output industri konstruksi, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lainnya dibedakan atas barang modal yang berasal dari produksi domestik, dan yang berasal dari impor. Untuk barang modal domestik, dapat diperoleh dengan dua cara. Pertama, dengan mengalokasikan output mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang menjadi pembentukan modal. Nilai tersebut masih harus ditambah dengan biaya angkut dan margin perdagangan, sehingga diperoleh PMTB atas dasar harga berlaku. Untuk memperoleh nilai atas dasar harga konstan adalah dengan men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan IHPB yang sesuai dengan jenis barang modal.

Pendekatan ke dua, yang harus dilakukan bila data output tidak tersedia adalah dengan cara “ekstrapolasi” atau mengalikasikan PMTB atas dasar harga konstan dengan indeks produksi jenis barang modal yang sesuai. Untuk itu penghitungan PMTB diawali dengan menghitung PMTB atas dasar harga konstan terlebih dahulu. Selanjutnya untuk memperoleh PMTB atas dasar harga berlaku, nilai PMTB atas dasar harga konstan tersebut di “*deflate*” (dikalikan) dengan indeks harga masing-masing jenis barang modal yang sesuai (sebagai inflator). Hal ini mensyaratkan bahwa PMTB atas dasar harga konstan di tahun-tahun sebelumnya sudah tersedia secara lengkap.

Penghitungan PMTB dalam bentuk mesin, alat angkutan dan barang modal lain yang berasal dari impor, dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) cara.

Pertama, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dari total nilai barang impor. Selanjutnya, barang modal tersebut dirinci menurut kelompok utama seperti mesin-mesin, alat angkutan dan barang modal lain. Apabila rician tersebut tidak tersedia dapat digunakan rasio tertentu sebagai alokator

(barang modal impor kode HS 2 digit). *Kedua*, untuk memperoleh PMTB atas dasar harga konstan adalah dengan cara men-*deflate* PMTB atas dasar harga berlaku dengan menggunakan indeks harga yang sesuai.

PMTB atas dasar harga berlaku untuk barang modal tak berwujud seperti eksplorasi mineral, dihitung dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang industri pertambangan. Dengan menggunakan data panel, pertumbuhan atas dasar harga berlaku dari aktivitas pertambangan itu menjadi pengali nilai eksplorasi mineral pada periode sebelumnya. Sedangkan PMTB atas dasar harga konstan-nya diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit dari PDRB industri pertambangan. Selain itu, data dari ESDM dan BP Migas diharapkan menjadi dasar atau data kontrol untuk data tahunannya.

Untuk perangkat lunak, PMTB atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara mengumpulkan data laporan keuangan perusahaan terbuka di bidang software. Untuk PMTB atas dasar harga konstan, diperoleh dengan men-*deflate* nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa perusahaan.

Penghitungan PMTB hasil karya hiburan, sastra, dan seni original (*entertainment, literary, or artistic original products*), data dikumpulkan adalah nilai sinetron dan program acara televisi yang dapat dibuat. Sedangkan data impor film diperoleh dari nilai impor film. PMTB atas dasar harga konstannya diperoleh dengan cara mendeflate nilai atas dasar harga berlaku dengan indeks implisit industri jasa hiburan dan IHPB barang impor.

Terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam penghitungan PMTB melalui pendekatan tak langsung (arus komoditas), yaitu:

- a. Rasio penggunaan output industri yang menjadi barang modal cenderung

statis. Untuk memperbaiki diperlukan survei dalam skala yang besar.

- b. Nilai margin perdagangan dan angkutan (*Trade and Transport Margin*) sulit diperoleh.
- c. Selang (*Lag*) waktu antara data tahun pengukuran (referensi) dengan data publikasi yang diperoleh dari sumber data tertentu, terlalu lama.

<https://kaltim.bps.go.id>

2.5 Perubahan Inventori

i Pendahuluan

Dalam aktivitas ekonomi, inventori berfungsi sebagai salah satu komponen yang dibutuhkan untuk keberlangsungan proses produksi, di samping tenaga kerja dan barang modal.

Dalam PDB/PDRB, komponen Perubahan Inventori merupakan bagian dari Pembentukan Modal Bruto, atau yang lebih dikenal sebagai investasi fisik yang terjadi pada kurun waktu tertentu di dalam suatu wilayah. Perubahan inventori menggambarkan bagian dari investasi yang direalisasikan dalam bentuk barang jadi, barang setengah jadi, serta bahan baku dan bahan penolong pada satu periode tertentu. Ketersediaan data perubahan inventori menjadi penting untuk memenuhi kebutuhan analisis tentang aktivitas investasi.

ii Konsep dan definisi

Pengertian sederhana dari inventori (persediaan) adalah barang yang dikuasai oleh produsen untuk tujuan diolah lebih lanjut (*intermediate consumption*) menjadi barang dalam bentuk lain, yang punya nilai ekonomi maupun nilai manfaat yang lebih tinggi. Termasuk dalam pengertian ini adalah barang yang masih dalam proses pengerjaan (*work in progress*), serta barang jadi yang belum dipasarkan dan masih dikuasai oleh pihak produsen.

Perubahan inventori adalah selisih antara nilai inventori pada akhir periode akuntansi dengan nilai inventori pada awal periode akuntansi. Perubahan inventori menjelaskan tentang perubahan posisi barang inventori, yang dapat bermakna penambahan (tanda positif) atau pengurangan (bertanda negatif).

Bagi produsen, keberadaan inventori diperlukan untuk menjaga kelangsungan proses produksi, sehingga perlu pencadangan baik dalam bentuk bahan baku atau bahan penolong. Ketidakpastian yang disebabkan pengaruh eksternal juga menjadi faktor pertimbangan bagi pengusaha untuk melakukan pencadangan (khususnya bahan baku). Bagi pedagang, pengadaan inventori lebih dipengaruhi oleh unsur spekulatif dengan harapan untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar. Sedangkan bagi pemerintah, kebijakan pencadangan khususnya komoditas strategis utamanya ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Karena menyangkut kepentingan masyarakat luas (publik), maka perlu ada pencadangan untuk beberapa komoditas bahan pokok seperti beras, terigu, minyak goreng dan gula pasir. Bagi rumah tangga pengadaan inventori lebih ditujukan untuk kemudahan dalam mengatur perilaku konsumsinya saja.

iii Cakupan

Inventori dapat diklasifikasikan menurut jenis barang adalah sebagai berikut :

- a. Inventori menurut industri, seperti produk atau hasil perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan, industri pengolahan, gas kota, air bersih, serta konstruksi;
- b. Berbagai jenis bahan baku & penolong (*material & supplies*), yaitu semua bahan, komponen atau persediaan untuk diproses lebih lanjut menjadi barang jadi;
- c. Barang jadi, yaitu barang yang telah diproses tetapi belum terjual atau belum digunakan, termasuk barang yang dijual dalam bentuk yang sama seperti pada waktu dibeli;

- d. Barang setengah jadi, yaitu barang-barang yang sebagian telah diolah atau belum selesai (tidak termasuk konstruksi yang belum selesai).
- e. Barang dagangan yang masih dikuasai oleh pedagang besar maupun pedagang eceran untuk tujuan dijual;
- f. Ternak untuk tujuan dipotong;
- g. Pengadaan barang oleh pedagang untuk tujuan dijual atau dipakai sebagai bahan bakar atau persediaan; dan
- h. Persediaan pada pemerintah, yang mencakup barang strategis seperti beras, kedelai, gula pasir, dan gandum.

iv Penghitungan Perubahan Inventori Tahunan

1. Sumber data

Sumber data yang digunakan untuk penghitungan komponen perubahan inventori adalah :

- Laporan keuangan perusahaan-perusahaan terkait dari survei atau dari mengunduh *website* Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id);
- Laporan Keuangan Perusahaan BUMN/BUMD
- Data komoditas pertambangan dari publikasi statistik pertambangan dan penggalian;
- Data Inventori Publikasi Tahunan Industri Besar Sedang.
- Data komoditas perkebunan;
- Indeks harga implisit PDRB industri terpilih, dan

- Indeks harga perdagangan besar (IHPB) terpilih.
- Data eksternal lain, seperti data persediaan beras dari Bulog, data semen dari Asosiasi Semen Indonesia (ASI), gula dari Dewan Gula Indonesia (DGI), dan ternak dari Ditjennak Kementan.

2. Metode Penghitungan

Terdapat 2 metode yang digunakan dalam penghitungan komponen perubahan inventori, yaitu pendekatan langsung dan pendekatan tidak langsung. Pendekatan langsung adalah pendekatan dari sisi “korporasi”, sedangkan pendekatan tidak langsung adalah pendekatan dari sisi “komoditas”.

Dilihat dari sisi manfaat-nya, pendekatan secara langsung menghasilkan data yang relatif lebih baik dibanding dengan pendekatan tidak langsung. Pendekatan komoditas hanya dapat dilakukan jika data posisi inventori tersedia secara rinci dan berkesinambungan.

PendekatanLangsung

Dengan menggunakan pendekatan langsung, akan diperoleh nilai posisi inventori di suatu waktu tertentu (umumnya di akhir tahun). Sumber data utama adalah laporan neraca akhir tahun (*balance sheet*) perusahaan. Untuk memperoleh nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku, diperlukan data inventori di tahun yang berurutan. Langkah penghitungan inventori dari laporan keuangan, adalah sebagai berikut :

- menghitung posisi inventori atas dasar harga konstan, dengan cara *mendeflate* stok awal dan akhir dengan IHPB akhir tahun;
- menghitung perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan

mengurangkan posisi di tahun berjalan dengan di tahun sebelumnya; dan

- menghitung perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan menginflasi perubahan inventori atas dasar harga konstan dengan IHPB rata-rata tahunan.

Pendekatan Tidak Langsung

Pendekatan tidak langsung disebut juga dengan pendekatan arus komoditas (*commodity flow*). Data utama yang digunakan adalah data volume dan harga masing-masing barang inventori. Nilai perubahan barang inventori atas dasar harga berlaku diperoleh dengan cara menghitung perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan rata-rata harga pembelian, atau harga penjualan bila data harga pembelian tidak tersedia. Perubahan barang inventori atas dasar harga konstan dihitung dengan: a. mendeflate nilai perubahan inventori atas dasar harga berlaku dengan indeks harga yang sesuai, b. mengalikan perubahan volume stok akhir dan stok awal dikalikan dengan harga barang di tahun dasar.

Keterbatasan dan masalah yang dihadapi di dalam menghitung komponen Perubahan Inventori adalah bahwa :

- Data inventori yang dibutuhkan adalah dalam bentuk posisi atau pada satu saat untuk periode waktu yang berurutan;
- Tidak seluruh komoditas inventori tersedia data volume dan harganya;
- Data perubahan inventori yang tersedia dalam bentuk volume umumnya tidak disertai data harganya. Jika data harga inventori tidak tersedia, maka dapat diasumsikan indeks harga komoditas inventori mengikuti indeks implisit PDRB yang sesuai;

Diperlukan *adjustment* dengan cara *me-mark-up*, guna untuk melengkapi estimasi untuk industri yang datanya tidak tersedia;

<https://kaltim.bps.go.id>

2.6 Ekspor Impor

i Pendahuluan

Aktivitas ekspor-impor dalam suatu wilayah diyakini telah terjadi sejak lama, bahkan sebelum wilayah itu ditetapkan sebagai wilayah pemerintah. Ragam barang dan jasa yang diproduksi serta disparitas harga, menjadi faktor utama munculnya aktivitas ekspor-impor. Daerah yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri berusaha mendatangkan dari daerah atau bahkan negara lain. Di sisi lain, daerah yang memproduksi barang dan jasa melebihi dari kebutuhan domestik, terdorong untuk memperluas pasar ke luar daerah atau bahkan ke luar negeri.

Seiring perkembangan zaman, aktivitas produksi dan permintaan masyarakat atas barang dan jasa semakin meningkat dan beragam. Kemajuan di bidang transportasi dan komunikasi juga turut memperlancar arus distribusi barang dan jasa. Kondisi tersebut semakin mendorong aktivitas ekspor-impor di suatu wilayah menjadi semakin berkembang.

ii Konsep dan definisi

Ekspor-impor di suatu wilayah didefinisikan sebagai alih kepemilikan ekonomi (baik penjualan/pembelian, barter, hadiah ataupun hibah) atas barang dan jasa antara residen wilayah tersebut dengan non residen yang berada di luar wilayah tersebut.

iii Cakupan

Ekspor-Import pada suatu wilayah terdiri dari:

- a. Ekspor/impor barang dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut

- b. Ekspor/impor jasa dari/ke luar negeri ke/dari provinsi tersebut
Cakupan jasa meliputi jasa pengangkutan, asuransi, komunikasi, pariwisata, dan jasa lainnya
- c. Ekspor Neto antar daerah
 - Ekspor antar daerah
 - Impor antar daerah

iv Penghitungan Ekspor-Impor Tahunan

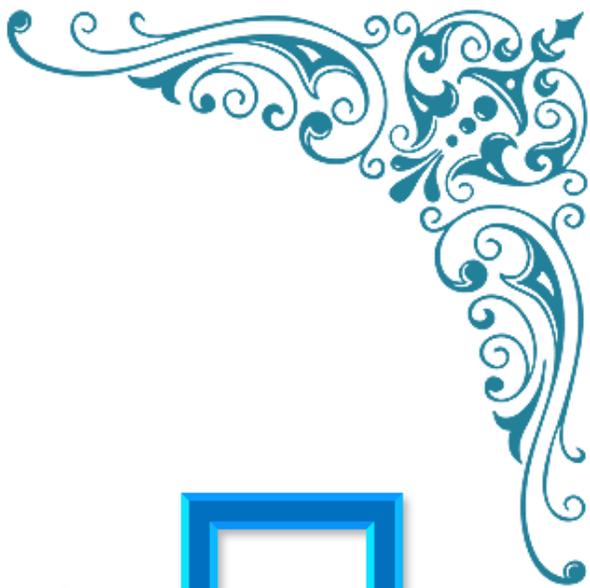
1. Sumber data

- a. Data Statistik Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dari BPS (dalam US\$)
- b. Data Statistik Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dari BPS (dalam US\$)
- c. Neraca Pembayaran Indonesia dari BI
- d. Laporan Simopel, yaitu laporan (bulanan) bongkar muat barang di pelabuhan;
- e. Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk provinsi di jembatan timbang;
- f. Informasi lalu lintas barang yang keluar masuk provinsi dari hasil survei.
- g. Kurs transaksi rata-rata tertimbang dari Bank Indonesia

2. Metode Penghitungan

Ekspor-impor barang luar negeri dinilai menurut harga *free on board (fob)* dalam US\$. Penghitungan ekspor barang luar negeri dilakukan

dengan mengalikan nilai barang (sesuai Pemberitahuan Ekspor Barang - PEB) dengan kurs transaksi beli rata-rata tertimbang. Sedangkan impor barang luar negeri dilakukan dengan mengalikan nilai barang (sesuai Pemberitahuan Impor Barang - PIB) dengan kurs transaksi jual rata-rata tertimbang. Nilai ekspor-impor jasa berasal dari Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Disamping itu nilai ekspor-impor tersebut masih ditambah/dikurangi dengan nilai pembelian langsung (*direct purchase*) dan transaksi yang tidak terdokumentasi (*undocumented transaction*) baik oleh residen maupun non residen. Sedangkan “ekspor neto antar wilayah” merupakan nilai sisa (residu) antara PDRB lapangan usaha dengan PDRB pengeluaran.



TINJAUAN EKONOMI BERDASARKAN PDRB KABUPATEN-KOTA



PDRB Kabupaten-Kota di Kalimantan Timur
Menurut Pengeluaran, 2012-2016

<https://kalim.bppom.go.id>

BAB III.

TINJAUAN EKONOMI

BERDASARKAN PDRB KABUPATEN-KOTA

3.1. Kontribusi PDRB Antar Kabupaten-Kota

Data PDRB menggambarkan kemampuan suatu wilayah atau region dalam mengelola sumber daya alam (SDA) yang dimiliki menjadi suatu proses produksi yang menciptakan nilai tambah. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing Kabupaten-Kota sangatlah bervariasi tergantung potensi SDA dan faktor produksi daerah tersebut. Perkembangan ekonomi suatu kabupaten-kota dapat dilihat dengan cara membandingkan angka PDRB dengan kabupaten-kota yang lain, termasuk juga melihat perkembangannya antar waktu.

Tabel 3.1
Kontribusi PDRB Kabupaten-Kota Atas Dasar Harga Berlaku,
Tahun 2012-2016 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2012	2016
Paser	6,97	7,32
Kutai Barat	4,27	4,33
Kutai Kartanegara	33,24	25,15
Kutai Timur	18,30	18,68
Berau	4,95	6,06
Penajam PU	1,28	1,49
Mahakam Ulu	0,30	0,41
Balikpapan	11,66	15,67
Samarinda	8,19	10,28
Bontang	10,83	10,61
Total	100,00	100,00

Untuk melihat peranan/kontribusi masing-masing PDRB Kabupaten/Kota terhadap total PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

digunakan PDRB atas dasar harga berlaku. Pada Tabel 3.1 disajikan perbandingan data PDRB Kabupaten/Kota secara rinci tahun 2012 dan tahun 2016, yang menunjukkan kontribusi dari masing-masing Kabupaten/Kota terhadap pembentukan total PDRB Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur.

Kontribusi Kabupaten/Kota terhadap pembentukan PDRB Dengan Migas di Kalimantan Timur pada tahun 2016, yang paling dominan (terbesar) ditempati oleh Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu 25,15 persen. Besarnya peranan ini berasal dari kekayaan SDA khususnya hasil pertambangan minyak dan gas bumi serta batubara. Kemudian Kabupaten Kutai Timur menempati peringkat kedua dengan peranan sebesar 18,68 persen yang dominannya disumbang oleh kinerja pertambangan batubara, dan berikutnya kota Balikpapan menempati urutan ketiga dengan peranan sebesar 15,67 persen, sebagai pusat jasa dan niaga serta industri kilang minyak. Jika dibandingkan dengan tahun 2012, meskipun tidak terjadi pergeseran posisi dari ketiga daerah terbesar penyumbang total PDRB Kalimantan Timur tersebut, namun secara besaran kontribusi terjadi penurunan, khususnya kabupaten Kutai Kertanegara pada tahun 2012 memiliki kontribusi cukup besar yaitu 33,24 persen sedang pada tahun 2016 hanya berkontribusi 25,15 persen. Hal ini disebabkan oleh semakin menurunnya produksi komoditas migas, dimana Kutai Kertanegara adalah penghasil migas terbesar di Kalimantan Timur. Penurunan produktifitas pertambangan batubara juga memberi dampak pada penurunan kontribusinya terhadap total kabupaten/kota se-Kalimantan Timur, sebagai dampak gejolak ekonomi global seiring dengan penurunan yang cukup drastis akan harga komoditas energi (minyak bumi dan batubara).

3.2. Struktur Ekonomi Kabupaten-Kota

Struktur ekonomi Kabupaten/Kota dapat dilihat dari distribusi setiap lapangan usaha/kategori atas dasar harga berlaku terhadap PDRB. Struktur ekonomi Kabupaten/Kota menggambarkan kondisi perekonomian

pada tahun berjalan. Secara umum, Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur mempunyai struktur ekonomi yang didominasi oleh lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian, Pertanian, Perikanan, Kehutanan, dan Industri Pengolahan Migas.

Pada tahun 2016, dari sepuluh Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur sebanyak enam Kabupaten/Kota perekonomiannya didominasi oleh komponen Net Ekspor, sedangkan beberapa kabupaten/kota lainnya didominasi oleh komponen PMTB (Pembentukan Modal Tetap Bruto) dan Konsumsi Akhir Rumah Tangga. Kabupaten/kota yang perekonomiannya tidak didominasi oleh komponen Net ekspor Kutai Barat, Penajam Paser Utara, Balikpapan, dan Samarinda. Perekonomian Kota Balikpapan didominasi oleh komponen PMTB (investasi) yang memberi share sebesar 41,31 persen. Sama halnya dengan Kota Balikpapan, perekonomian di Kabupaten Kutai Barat juga didominasi oleh komponen PMTB dengan share sebesar 38,67 persen. Sedangkan Kota Samarinda dan Kabupaten Penajam Paser Utara didominasi oleh komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga masing-masing dengan share 47,68 persen dan 42,58 persen.

Jika dilihat lebih lanjut, pada tahun 2016 kabupaten/kota yang sebagian besar struktur perekonomiannya didominasi oleh Net Ekspor yaitu Kabupaten Paser sebesar 62,86 persen, yang ditopang oleh kegiatan ekspor dengan peranan 96,91 persen. Diikuti kabupaten Kutai Kartanegara dengan share Net Ekspor sebesar 49,11 persen yang juga didominasi kegiatan ekspor sebesar 85,58 persen. Selanjutnya Kutai Timur komponen Net Ekspor memberi share sebesar 70,79 persen, dimana komponen Ekspor memberikan peranan hingga 111,85 persen. Kota Bontang dengan share Net Ekspor mencapai 77,74 persen juga ditopang oleh kegiatan ekspor yang memberikan kontribusi hingga 162,45 persen.

Tabel 3.2
Tiga Komponen Dominan Dalam Struktur Ekonomi Kabupaten-Kota
menurut PDRB Atas Dasar Harga Berlaku,
Tahun 2016

Kabkota	Peringkat I		Peringkat II		Peringkat III	
	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)	Komponen	Share (%)
Paser	Net Ekspor	62,86	PMTB	18,40	K. Ruta	14,29
Kubar	PMTB	38,67	Net Ekspor	34,77	K. Ruta	16,65
Kukar	Net Ekspor	49,11	PMTB	34,33	K. Ruta	12,47
Kutim	Net Ekspor	70,79	PMTB	18,97	K. Ruta	7,12
Berau	Net Ekspor	58,79	PMTB	22,34	K. Ruta	13,36
Penajam PU	K. Ruta	42,58	PMTB	33,60	K. Pemerintah	13,26
Mahulu	Net Ekspor	40,24	PMTB	23,86	K. Ruta	22,55
Balikpapan	PMTB	41,31	K. Ruta	27,38	Net Ekspor	26,57
Samarinda	K. Ruta	47,68	PMTB	39,01	K. Pemerintah	14,85
Bontang	Net Ekspor	77,74	PMTB	10,74	K. Ruta	9,18

3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-Kota

Laju pertumbuhan ekonomi merupakan suatu indikator ekonomi makro yang menggambarkan tingkat pertumbuhan konsumsi atau pengeluaran pada suatu waktu tertentu. Indikator ini penting untuk mengetahui kinerja pembangunan yang telah dilakukan/dilaksanakan dan untuk menentukan arah serta rencana pembangunan di suatu daerah ke depan. Untuk mengetahui laju pertumbuhan ekonomi secara riil yang terjadi setiap tahun dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap perkembangan angka PDRB atas dasar harga konstan. Angka ini memiliki makna untuk menjelaskan apakah ada peningkatan atau penurunan dari kinerja pembangunan ekonomi suatu daerah tiap tahunnya.

Kinerja ekonomi Kalimantan Timur selama periode 2012- 2016 cenderung mengalami penurunan, dan bahkan tahun 2016 kondisi ekonomi Kalimantan Timur mengalami kontraksi sebesar negatif -0.38 persen. Kondisi

ini dikarenakan terjadinya krisis global yang melanda masyarakat dunia, seiring dengan merosotnya beberapa harga komoditas energi di pasar internasional, seperti komoditi migas dan batubara. Kondisi tersebut juga berimbas pada perkembangan ekonomi menurut Kabupaten/Kota se-Kalimantan Timur yang ada kecenderungan menurun/melambat dan bahkan ada beberapa kabupaten juga ikut terkoreksi pertumbuhannya, seperti kabupaten Paser dengan laju pertumbuhan sebesar negatif 4,79 persen, diikuti kabupaten Kutai Barat sebesar negatif 0,72 persen, Kabupaten Kutai Kartanegara yang terkoreksi negatif 1,71 persen, Kabupaten Kutai Timur sebesar negatif 1,07 persen, Kabupaten Berau yang terkoreksi sebesar negatif 1,70 persen, kabupaten PPU yang terkoreksi sebesar negatif 0,27 persen, dan Kota Bontang yang terkoreksi 1,49 persen. Merosotnya kinerja ekonomi ketujuh daerah tersebut lebih dipengaruhi oleh menurunnya kinerja lapangan usaha dominan di daerah tersebut. Adapun dominasi struktur ekonomi ketujuh daerah tersebut masih bertumpu pada kinerja pertambangan migas dan batubara, yang pada saat bersamaan terjadi gejolak harga dan menurunnya permintaan pasar global akan komoditi tersebut.

Tabel 3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten-Kota Atas Dasar Harga Konstan 2010, Tahun 2012 dan 2016 (Persen)

Kabupaten/ Kota	2012	2016
Paser	6,05	(4,79)
Kutai Barat	18,99	(0,72)
Kutai Kartanegara	5,49	(1,71)
Kutai Timur	11,54	(1,07)
Berau	15,47	(1,70)
Penajam PU	5,85	(0,27)
Mahakam Ulu	10,06	3,38
Balikpapan	5,57	4,76
Samarinda	0,50	0,23
Bontang	(9,18)	(1,49)

Kabupaten/ Kota	2012	2016
Kalimantan Timur	5,26	(0,38)

Selanjutnya kabupaten/kota lainnya pada tahun 2016, secara umum kinerja ekonominya menunjukkan pergerakan positif meskipun tidak setinggi tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan ekonomi tertinggi pada tahun 2016 tercatat di Kota Balikpapan sebesar 4,76 persen, diikuti Kabupaten Mahakam Ulu yang tumbuh sebesar 3,38 persen, dan Kota Samarinda yang tumbuh sebesar 0,23 persen.

3.4 Peranan Kabupaten-Kota Menurut Komponen Pengeluaran

A. Konsumsi Akhir Rumah Tangga

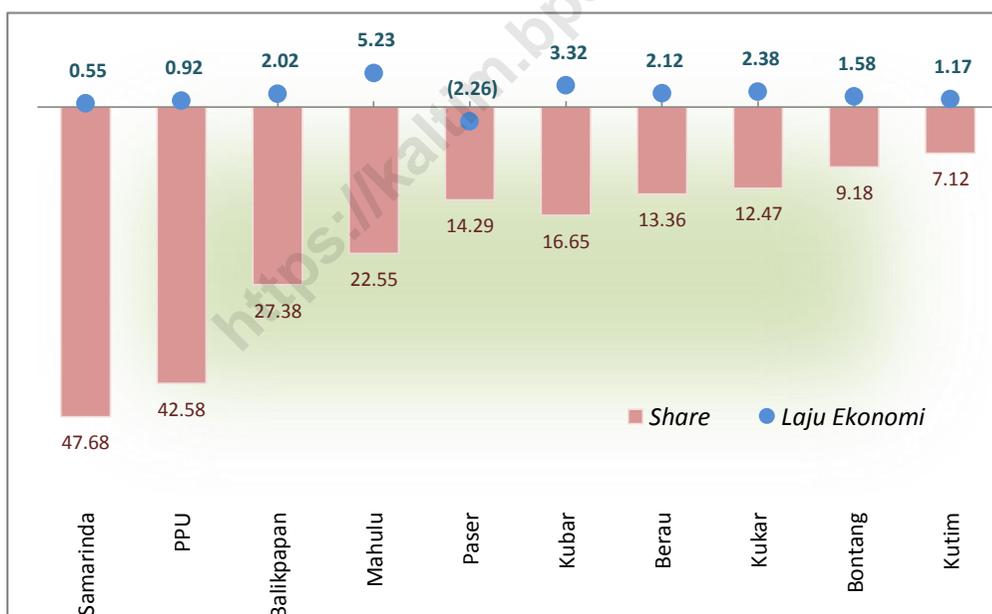
Lapangan usaha Pertanian, Perikanan, Kehutanan ini mencakup Pertanian dan Jasa Pertanian yang terdiri atas tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan. Selanjutnya Lapangan Usaha Kehutanan dan Penebangan Kayu, dan Lapangan Usaha Perikanan. Dan hingga saat ini lapangan usaha tersebut masih menjadi tumpuan dan harapan dalam penyerapan tenaga kerja di Kalimantan Timur.

Pada tahun 2016 komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga memberi kontribusi sebesar 18,98 persen terhadap total PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur. Tiga daerah penyumbang terbesar adalah Kota Samarinda sebesar 28,91 persen, Kota Balikpapan sebesar 25,30 persen, dan Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 18,49 persen. Subkomponen makanan, minuman, dan rokok menjadi penyumbang terbesar terhadap komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga.

Jika diamati laju pertumbuhan komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga kabupaten/kota pada tahun 2016, Kabupaten Mahakam Hulu

merupakan kabupaten dengan pertumbuhan tertinggi dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Timur. Konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Mahakam Hulu mampu tumbuh hingga 5,23 persen. Selanjutnya, Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Kutai Kertanegara mengikuti dibelakangnya dengan pertumbuhan masing-masing mencapai 3,32 persen dan 2,38 persen. Sebaliknya, konsumsi akhir rumah tangga di Kabupaten Paser mengalami kontraksi sebesar 2,26 persen dan merupakan satu-satunya kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang konsumsi akhir rumah tangganya mengalami kontraksi.

Gambar 3.1
Share dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Komponen Konsumsi Akhir Rumah Tangga Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2016



B. Konsumsi Akhir LNPRT

Komponen konsumsi akhir Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) mencakup konsumsi antara, kompensasi tenaga kerja, penyusutan, dan pajak lainnya atas produksi (dikurangi subsidi).

Peranan Konsumsi akhir LNPRT dalam PDRB Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur masih sangat kecil jika dibandingkan dengan komponen pengeluaran lainnya. Meskipun demikian, peranan institusi ini dalam perekonomian wilayah masih dapat ditingkatkan lagi mengingat fungsi lembaga non profit yang cukup penting bagi masyarakat atau rumah tangga.. Pada tahun 2016, komponen konsumsi akhir LNPRT memberikan kontribusi sebesar 0,48 persen dalam total perekonomian Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur.

Kabupaten/Kota yang berkontribusi terbesar pada komponen Konsumsi Akhir LNPRT tahun 2016 adalah Kota Samarinda sebesar 23,63 persen, Kabupaten Kutai Kartanegara 19,31 persen, dan Kota Balikpapan 18,77 persen. Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), dan Kabupaten Mahakam Hulu (Mahulu) adalah tiga kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang memiliki kontribusi paling kecil pada komponen Konsumsi Akhir LNPRT, masing-masing secara berturut-turut sebesar 2,76 persen, 2,00 persen, dan 0,88 persen.

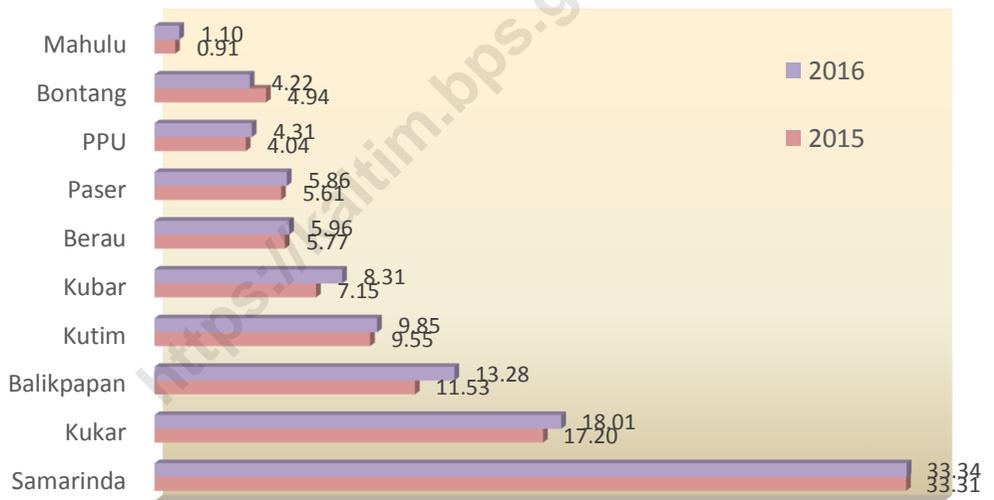
Berbeda dengan kontribusinya yang paling kecil pada komponen Konsumsi Akhir LNPRT, Kabupaten Mahakam Hulu merupakan kabupaten yang memiliki laju pertumbuhan tertinggi pada komponen konsumsi akhir LNPRT dengan angka pertumbuhan mencapai 1,52 persen. Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, dan Kabupaten Paser adalah kabupaten/kota di Kalimantan Timur yang komponen konsumsi akhir LNPRT-nya mengalami kontraksi. Kontraksi paling dalam dialami oleh Kabupaten Kutai Timur dengan (8,20) persen, diikuti oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kontraksi mencapai (7,62) persen.

C. Konsumsi Akhir Pemerintah

Komponen Konsumsi Akhir Pemerintah pada tahun 2016 memberikan kontribusi dalam perekonomian Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur

sebesar 5,12 persen. Secara spasial, kontribusi komponen tersebut didukung oleh kota Samarinda sebagai pusat pemerintahan dan ibukota Provinsi Kalimantan Timur. Kota Samarinda memberikan kontribusi hingga 33,34 persen terhadap total komponen Konsumsi Akhir Pemerintahan kabupaten/kota di Kalimantan Timur. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kota Balikpapan mengikuti setelahnya dengan kontribusi mencapai 18,01 persen dan 13,28 persen.

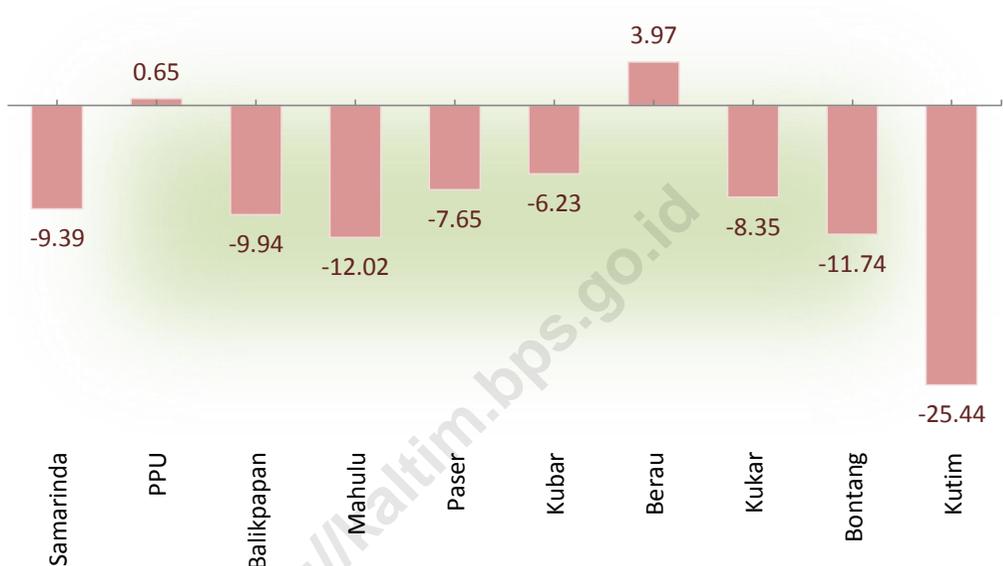
Gambar 3.2
Share Komponen Konsumsi Akhir Pemerintah
Menurut Kabupaten/Kota (persen), 2015-2016



Jika diamati laju pertumbuhan komponen Konsumsi Akhir Pemerintah di kabupaten/kota pada tahun 2016, menunjukkan kabupaten/kota di Kalimantan Timur secara umum mengalami kontraksi. Kabupaten/kota yang mengalami pertumbuhan positif hanyalah kabupaten Mahakam Hulu dan Kutai Barat, masing-masing dengan laju pertumbuhan sebesar 3,97 persen dan 0,65 persen. Kota Bontang merupakan kota di Kalimantan Timur dengan pertumbuhan konsumsi akhir pemerintah terkontraksi paling dalam sebesar (25,44) persen, yang kemudian diikuti oleh Kabupaten Kutai Timur sebesar

(12,02) persen, dan selanjutnya adalah kota Samarinda dengan pertumbuhan (11,74) persen.

Gambar 3.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Komponen Konsumsi Akhir Pemerintah
Menurut Kabupaten-Kota (persen), 2016



D. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)

Komponen Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontribusi sebesar 30,92 persen terhadap total perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Komponen ini merupakan komponen dengan kontribusi terbesar kedua dalam menyumbang angka PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten/Kota yang berkontribusi terbesar pada komponen PMTB pada tahun 2016 adalah Kabupaten Kutai Kartanegara sebesar 31,25 persen, diikuti Kota Balikpapan sebesar 23,43 persen, dan Kota Samarinda dengan kontribusi sebesar 14,52 persen.

Tabel 3.4. Share dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Komponen PMTB Menurut Kabupaten-Kota, Tahun 2015-2016 (Persen)

Kabupaten/ Kota	Share		Laju Ekonomi	
	2015	2016	2015	2016
Paser	4,69	4,87	(0,28)	(2,94)
Kutai Barat	5,47	6,05	9,24	(1,51)
Kutai				
Kartanegara	29,15	31,25	(1,51)	(5,85)
Kutai Timur	12,76	12,82	(1,67)	(10,35)
Berau	4,49	4,90	(0,08)	0,19
Penajam PU	1,73	1,81	(1,11)	(5,31)
Mahakam Ulu	0,28	0,36	16,72	10,42
Balikpapan	20,93	23,43	1,22	2,90
Samarinda	15,18	14,52	(3,49)	(8,52)
Bontang	5,32	4,13	(2,49)	(32,62)
Total	100,00	100,00	(0,68)	(5,88)

Jika diamati perkembangan komponen PMTB pada tahun 2016, secara umum menunjukkan perlambatan/penurunan dari tahun sebelumnya. Kondisi ini dipengaruhi oleh menurunnya investasi baik dari dalam negeri (PMDN) maupun investasi asing (PMA). Selain itu penurunan juga dapat dilihat pada belanja modal pembiayaan pembangunan infrastruktur umum maupun oleh swasta dan masyarakat, sebagai *multiflyer effect* dari penurunan aktivitas pertambangan batubara dan migas. Pada tahun 2016, laju pertumbuhan komponen PMTB yang paling rendah (terkontraksi) dari kabupaten/kota se-Kalimantan Timur adalah Kota Bontang yang mengalami kontraksi sebesar negatif 32,62 persen, diikuti Kabupaten Kutai Timur yang terkontraksi sebesar 10,35 persen, dan kota Samarinda yang juga terkontraksi sebesar negatif 8,52 persen. Namun demikian, ditengah terpaan situasi ekonomi khususnya komponen PMTB yang cenderung mengalami perlambata tersebut, Kabupaten Mahakam Hulu, Kota Balikpapan, dan Kabupaten Berau mampu tumbuh masing-masing secara berturut-turut

sebesar 10,42 persen, 2,90 persen, dan 0,19 persen. Sebagai wilayah pemekaran yang baru, sewajarnya pembangunan/pengembangan pada wilayah tersebut masih terus dipacu, khususnya untuk pembangunan infrastruktur umum, seperti gedung perkantoran, jalan dan lainnya.

E. Perubahan Inventori

Secara konsep, yang dimaksud dengan perubahan inventori adalah perubahan dalam bentuk **“persediaan”** berbagai barang yang belum digunakan lebih lanjut dalam proses produksi, konsumsi ataupun investasi (kapital). Perubahan yang dimaksud disini bisa berarti penambahan (bertanda positif) dan atau pengurangan (bertanda negatif).

Dari sisi penghitungan, komponen Perubahan Inventori merupakan salah satu komponen yang hasilnya bisa memiliki 2 (dua) tanda angka, positif atau negatif (disamping komponen ekspor neto antar daerah). Apabila perubahan inventori bertanda positif berarti terjadi penambahan persediaan barang, sedangkan apabila bertanda negatif berarti terjadi pengurangan persediaan. Terjadinya penumpukan barang inventori mengindikasikan bahwa distribusi atau pemasaran tidak berjalan dengan sempurna. Secara umum, komponen perubahan inventori dihitung berdasarkan pengukuran terhadap nilai persediaan barang pada awal dan akhir tahun dari dua posisi nilai persediaan (konsep stok).

Berbeda dengan komponen pengeluaran lain yang dapat dianalisis agak rinci, perubahan inventori baru dapat dianalisis dari sisi proporsinya saja. Perbedaan dalam pendekatan dan tata cara estimasi menyebabkan komponen inventori tidak banyak dikaji lebih dalam. Hal utama yang dapat dilihat dari komponen ini adalah, bahwa proporsi dalam PDRB pada umumnya mempunyai besaran atau nilai yang berfluktuasi baik dalam level maupun tandanya (positif atau negatif).

Pada tahun 2016, proporsi komponen perubahan inventori kabupaten/kota terhadap PDRB masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Timur bernilai positif. Kabupaten Paser dengan nilai proporsi 0,62 persen adalah kabupaten dengan nilai proporsi perubahan inventori terhadap PDRB tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Sedangkan, Kota Bontang adalah kota dengan nilai proporsi perubahan inventori terhadap PDRB terendah, yaitu sebesar 0,10 persen.

F. Net Ekspor

Komponen net ekspor secara implisit mencakup dua unsur pokok, yaitu: Ekspor antar daerah dan impor antar daerah. Sama halnya dengan perubahan inventori, ekspor neto antar daerah juga bisa bertanda positif maupun negatif. Jika komponen ini bertanda “**positif**” berarti nilai ekspor antar daerah lebih besar daripada impor antar daerah, demikian pula sebaliknya.

Pada saat ini untuk memisahkan ekspor neto antar daerah menjadi nilai ekspor antar daerah dan nilai impor antar daerah dilakukan dengan metode tidak langsung, yaitu dengan metode *cross hauling*. Metode ini dilakukan dengan memanfaatkan sifat keseimbangan permintaan (*demand*) dan penyediaan (*supply*) setiap komoditas di suatu perekonomian. Penghitungan ekspor impor dengan metode *cross-hauling* diawali dengan metode *commodity balance*. Metode *commodity balance* adalah metode penghitungan ekspor-impor dengan memanfaatkan Tabel Input-Output “bayangan”. Dalam metode ini, transaksi ekspor-impor dipandang sebagai item penyeimbang (*balancing item*) dalam keseimbangan *demand* dan *supply* suatu perekonomian.

Tabel 3.5. Share Komponen Net Ekspor Menurut Kabupaten-Kota, Tahun 2015-2016 (Persen)

Kabupaten/ Kota	Share	
	2015	2016
Paser	10,24	11,67
Kutai Barat	3,30	3,82
Kutai Kartanegara	26,79	31,35
Kutai Timur	27,03	33,56
Berau	7,46	9,04
Penajam PU	0,30	0,37
Mahakam Ulu	0,36	0,42
Balikpapan	8,10	10,57
Samarinda	(2,33)	(0,80)
Bontang	18,76	20,94
Total	100,00	100,00

Pada tahun 2016 komponen net ekspor menyumbang sebesar 44,08 persen dan merupakan komponen penyumbang terbesar terhadap total perekonomian Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Jika diamati perkembangan komponen net ekspor pada tahun 2016, secara umum menunjukkan tanda positif kecuali Kota Samarinda. Kondisi ini menunjukkan bahwa di Kota Samarinda nilai impor antar daerah lebih tinggi dibandingkan nilai ekspor antar daerah.

3.5 PDRB Per Kapita

PDRB per kapita menggambarkan rata-rata produktivitas yang dihasilkan oleh setiap penduduk selama satu tahun di suatu daerah. Selain itu dalam batas tertentu dapat pula digunakan sebagai indikator dalam menentukan pencapaian tingkat kemakmuran di daerah tersebut. Adapun nilai/angka yang dimaksud, diperoleh dengan cara membagi nilai PDRB

dengan jumlah penduduk pertengahan tahun berjalan (pada tahun yang sama), sehingga dapat diketahui bahwa besaran dari dua variabel di atas merupakan faktor dominan yang mempengaruhi pembentukan nilai PDRB per kapita. Sebagai gambaran sederhana, apabila nilai PDRBnya besar dengan jumlah penduduk sedikit, maka dapat dipastikan PDRB per kapita daerah tersebut akan besar, demikian pula sebaliknya. Oleh sebab itu besaran nilai PDRB per kapita dapat menjadi ukuran terhadap tingkat kemakmuran suatu daerah, meskipun angka tersebut tidak dapat digunakan secara langsung sebagai tolak ukur. Nilai PDRB perkapita hanya menunjukkan jumlah pendapatan yang dinikmati oleh penduduk karena di dalamnya masih terkandung nilai penyusutan barang-barang modal dan pajak tak langsung neto serta pendapatan faktor produksi neto. Sehingga perlu dipertegas bahwa angka tersebut tidak menggambarkan penerimaan penduduk secara nyata karena hanya merupakan nilai rata-rata.

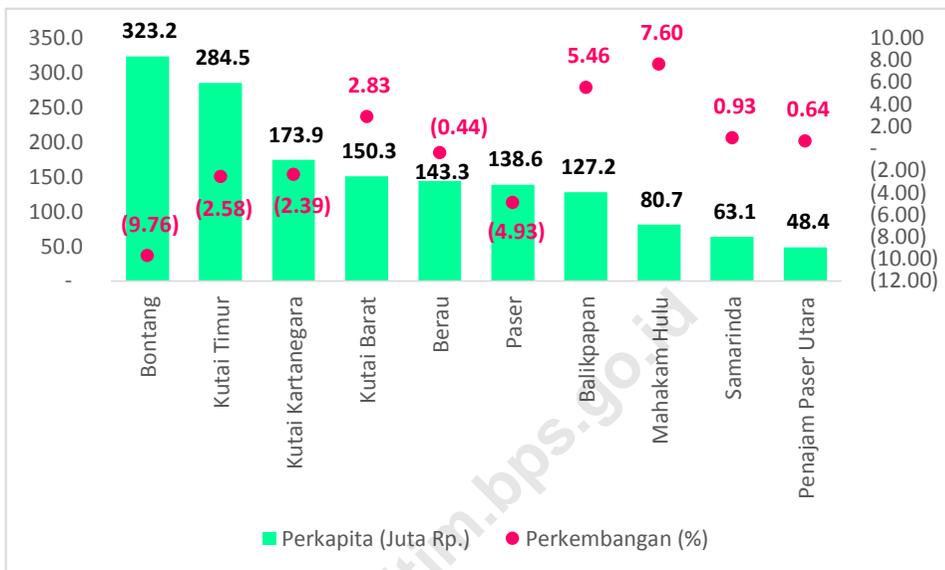
Pada tahun 2016, PDRB Perkapita Kabupaten/Kota di Kalimantan Timur secara spasial menunjukkan 5 Kabupaten/Kota mengalami peningkatan dan 5 Kabupaten/Kota mengalami penurunan. PDRB perkapita Kabupaten Mahakam Ulu pada tahun 2016 mencapai 80,72 juta rupiah mengalami peningkatan sebesar 7,60 persen dari tahun sebelumnya, hal ini didorong oleh meningkatnya aktifitas perekonomian sebagai wilayah baru (pemekaran dari Kutai Barat). Sedangkan PDRB perkapita Kota Balikpapan sebesar 127,24 juta rupiah naik 5,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya, begitu pula Kota Samarinda dengan PDRB perkapita sebesar 63,10 juta rupiah naik 0,93 persen. Semakin meningkatnya PDRB perkapita wilayah perkotaan seperti Kota Balikpapan dan Samarinda lebih didorong oleh perkembangan perkotaan sebagai pusat perdagangan dan jasa. Selain itu Kabupaten/Kota yang juga mengalami peningkatan PDRB perkapita pada tahun 2016 antara lain Kabupaten Kutai Barat dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

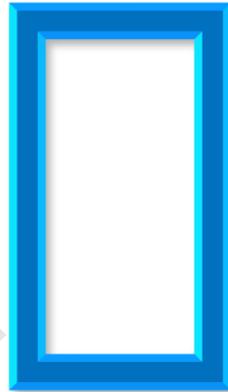
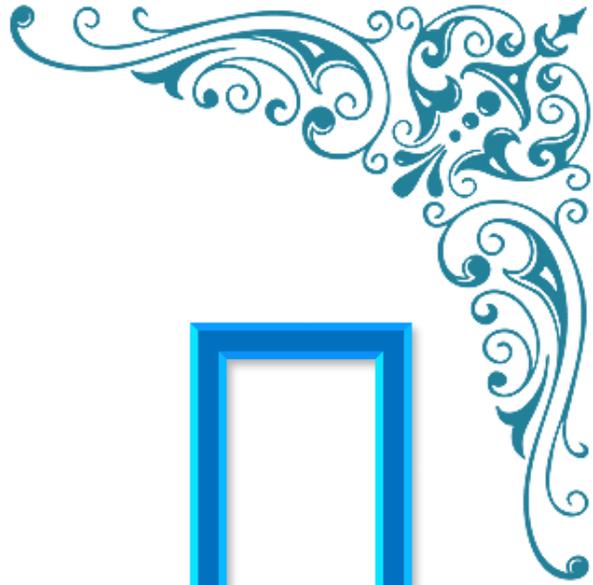
Tabel 3.6
Perkembangan PDRB/Kapita Menurut Kabupaten-Kota,
Tahun 2012-2016(Juta Rupiah)

No	Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
1	Paser	143,76	147,67	153,22	145,82	138,64
2	Kutai Barat	150,25	152,45	147,99	146,16	150,30
3	Kutai Kartanegara	251,42	236,61	223,75	178,18	173,92
4	Kutai Timur	327,10	334,49	309,57	292,08	284,55
5	Berau	130,01	142,08	144,51	143,95	143,32
6	Penajam Paser Utara	43,49	46,48	49,89	48,13	48,44
7	Mahakam Ulu	59,79	61,28	68,68	75,02	80,72
8	Balikpapan	100,63	108,18	118,37	120,66	127,24
9	Samarinda	53,92	57,39	60,57	62,52	63,10
10	Bontang	358,42	361,03	369,99	358,20	323,22

Diamati dari nilai PDRB perkapita tertinggi pada tahun 2016, maka kota Bontang berada pada peringkat pertama dengan nilai sebesar 323,22 juta rupiah, namun mengalami penurunan sebesar negatif 9,76 persen dari tahun sebelumnya. Diikuti Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, dengan nilai PDRB perkapita masing-masing sebesar 284,55 juta rupiah dan 173,92 juta rupiah. Sementara Kabupaten/Kota dengan PDRB per kapita terendah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan nilai 48,44 juta rupiah.

Gambar 3.4
PDRB Perkapita dan Perkembangannya Menurut Kabupaten/Kota
Di Kalimantan Timur (Juta Rp), 2016





LAMPIRAN

PPRB Kabupaten-Kota di Kalimantan Timur
Menurut Pengeluaran, 2012-2016

<https://kaltim.bps.go.id>



Lampiran 1.**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2012-2016 (Juta Rupiah)**

No	KABUPATEN/KOTA	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Paser	35 093 422	36 916 267	39 250 901	38 249 407	37 191 462
2	Kutai Barat	21 500 739	21 956 103	21 442 756	21 316 264	21 989 397
3	Kutai Kartanegara	167 314 214	161 634 301	156 723 064	127 897 432	127 831 314
4	Kutai Timur	92 109 092	98 411 527	95 030 362	93 498 672	94 921 969
5	Berau	24 907 139	28 044 279	29 366 863	30 069 865	30 788 945
6	Penajam Paser Utara	6 437 387	6 981 002	7 589 459	7 423 760	7 557 111
7	Mahakam Ulu	1 526 012	1 573 480	1 778 452	1 948 281	2 105 999
8	Balikpapan	58 695 646	64 292 573	71 622 701	74 273 354	79 650 206
9	Samarinda	41 242 818	44 824 302	48 273 715	50 802 369	52 266 340
10	Bontang	54 511 514	56 278 079	59 055 313	58 502 703	53 935 808
Total Kabupaten/Kota		503 337 982	520 911 913	530 133 587	503 982 108	508 238 553

Lampiran 2.**PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2012-2016 (Juta Rupiah)**

No	KABUPATEN/KOTA	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Paser	31 160 226	33 281 215	34 782 536	34 439 758	32 791 809
2	Kutai Barat	18 045 834	18 558 606	18 906 634	18 640 130	18 505 884
3	Kutai Kartanegara	129 958 165	130 010 301	128 610 623	119 506 305	117 460 844
4	Kutai Timur	77 552 440	80 730 972	83 496 499	84 705 082	83 795 054
5	Berau	20 467 253	22 591 474	24 449 675	25 923 254	25 482 274
6	Penajam Paser Utara	5 771 012	6 201 814	6 373 235	6 380 413	6 363 156
7	Mahakam Ulu	1 350 082	1 359 366	1 426 530	1 473 862	1 523 652
8	Balikpapan	63 615 144	65 907 250	68 963 949	69 858 774	73 184 926
9	Samarinda	35 711 573	37 471 853	39 506 305	39 523 223	39 614 102
10	Bontang	45 623 745	43 012 336	41 622 133	43 434 556	42 786 930
Total Kabupaten/Kota		429 255 474	439 125 186	448 138 121	443 885 358	441 508 630

Lampiran 3.**DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA BERLAKU MENURUT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2012-2016 (Persen)**

No	KABUPATEN/KOTA	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Paser	6,97	7,09	7,40	7,59	7,32
2	Kutai Barat	4,27	4,21	4,04	4,23	4,33
3	Kutai Kartanegara	33,24	31,03	29,56	25,38	25,15
4	Kutai Timur	18,30	18,89	17,93	18,55	18,68
5	Berau	4,95	5,38	5,54	5,97	6,06
6	Penajam Paser Utara	1,28	1,34	1,43	1,47	1,49
7	Mahakam Ulu	0,30	0,30	0,34	0,39	0,41
8	Balikpapan	11,66	12,34	13,51	14,74	15,67
9	Samarinda	8,19	8,60	9,11	10,08	10,28
10	Bontang	10,83	10,80	11,14	11,61	10,61
Total Kabupaten/Kota		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 4.**LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO
ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 MENURUT KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2012-2016 (Persen)**

No	KABUPATEN/KOTA	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Paser	6,05	6,81	4,51	(0,99)	(4,79)
2	Kutai Barat	18,99	2,84	1,88	(1,41)	(0,72)
3	Kutai Kartanegara	5,49	0,04	(1,08)	(7,08)	(1,71)
4	Kutai Timur	11,54	4,10	3,43	1,45	(1,07)
5	Berau	15,47	10,38	8,23	6,03	(1,70)
6	Penajam Paser Utara	5,85	7,46	2,76	0,11	(0,27)
7	Mahakam Ulu	10,06	0,69	4,94	3,32	3,38
8	Balikpapan	5,57	3,60	4,64	1,30	4,76
9	Samarinda	0,50	4,93	5,43	0,04	0,23
10	Bontang	(9,18)	(5,72)	(3,23)	4,35	(1,49)
Total Kabupaten/Kota		5,29	2,30	2,05	(0,95)	(0,54)

Lampiran 5. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rupiah)
KABUPATEN : PASER

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	3 964 977	4 472 389	4 854 928	5 163 912	5 314 867
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	35 192	42 848	52 797	60 922	60 533
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	1 028 895	1 201 836	1 387 989	1 401 209	1 363 785
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	5 566 727	6 690 778	6 811 554	6 857 951	6 844 863
5. PERUBAHAN INVENTORI	238 635	247 010	349 639	363 649	228 917
6. NET EKSPOR	24 258 996	24 261 406	25 793 994	24 401 764	23 378 497
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	35 093 422	36 916 267	39 250 901	38 249 407	37 191 462

Lampiran 6. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rupiah)
KABUPATEN : PASER

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	3 491 409	3 695 481	3 859 285	3 895 231	3 807 325
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	31 778	36 770	42 660	46 567	43 724
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	934 379	1 040 060	1 030 956	894 341	810 330
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	5 216 226	5 745 147	5 806 645	5 790 434	5 620 193
5. PERUBAHAN INVENTORI	211 890	222 698	306 348	308 524	195 164
6. NET EKSPOR	21 274 545	22 541 058	23 736 642	23 504 661	22 315 072
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	31 160 226	33 281 215	34 782 536	34 439 758	32 791 809

Lampiran 7. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (PERSEN)
KABUPATEN : PASER

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	8,06	5,84	4,43	0,93	(2,26)
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	5,17	15,71	16,02	9,16	(6,10)
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	12,76	11,31	(0,88)	(13,25)	(9,39)
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	8,36	10,14	1,07	(0,28)	(2,94)
5. PERUBAHAN INVENTORI	16,74	5,10	37,56	0,71	(36,74)
6. NET EKSPOR	4,81	5,95	5,30	(0,98)	(5,06)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6,05	6,81	4,51	(0,99)	(4,79)

Lampiran 8. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)
KABUPATEN : PASER

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	11,30	12,11	12,37	13,50	14,29
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	0,10	0,12	0,13	0,16	0,16
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	2,93	3,26	3,54	3,66	3,67
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	15,86	18,12	17,35	17,93	18,40
5. PERUBAHAN INVENTORI	0,68	0,67	0,89	0,95	0,62
6. NET EKSPOR	69,13	65,72	65,72	63,80	62,86
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 9. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rupiah)
KABUPATEN : KUTAI BARAT

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	2 495 550	2 848 120	3 156 594	3 405 227	3 661 726
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	100 575	135 467	162 044	193 085	199 431
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	1 049 723	1 254 788	1 517 869	1 787 417	1 933 844
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	5 801 477	5 916 724	6 784 104	7 999 934	8 504 082
5. PERUBAHAN INVENTORI	70 691	110 153	143 675	77 565	45 331
6. NET EKSPOR	11 982 723	11 690 851	9 678 471	7 853 036	7 644 983
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	21 500 739	21 956 103	21 442 756	21 316 264	21 989 397

Lampiran 10. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rupiah)
KABUPATEN : KUTAI BARAT

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	2 218 391	2 367 301	2 482 207	2 542 192	2 626 602
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	90 549	111 311	125 187	138 748	139 180
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	962 914	1 070 058	1 137 277	1 150 370	1 157 846
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	4 914 777	5 165 745	5 560 161	6 073 927	5 982 100
5. PERUBAHAN INVENTORI	50 353	53 828	58 738	38 071	22 462
6. NET EKSPOR	9 808 849	9 790 362	9 543 064	8 696 821	8 577 694
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18 045 834	18 558 606	18 906 634	18 640 130	18 505 884

Lampiran 11. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (PERSEN)
KABUPATEN : KUTAI BARAT

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	9,31	6,71	4,85	2,42	3,32
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	10,49	22,93	12,47	10,83	0,31
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	9,50	11,13	6,28	1,15	0,65
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	9,31	5,11	7,64	9,24	(1,51)
5. PERUBAHAN INVENTORI	1,69	6,90	9,12	(35,18)	(41,00)
6. NET EKSPOR	28,57	(0,19)	(2,53)	(8,87)	(1,37)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	18,99	2,84	1,88	(1,41)	(0,72)

Lampiran 12. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)
KABUPATEN : KUTAI BARAT

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	11,61	12,97	14,72	15,97	16,65
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	0,47	0,62	0,76	0,91	0,91
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	4,88	5,71	7,08	8,39	8,79
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	26,98	26,95	31,64	37,53	38,67
5. PERUBAHAN INVENTORI	0,33	0,50	0,67	0,36	0,21
6. NET EKSPOR	55,73	53,25	45,14	36,84	34,77
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 13. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rupiah)
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	11 322 734	12 444 815	13 547 523	14 790 103	15 939 441
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	204 790	308 582	375 671	438 591	423 083
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	2 857 997	3 397 311	4 136 490	4 298 730	4 191 442
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	39 703 121	39 176 994	41 072 940	42 616 269	43 890 295
5. PERUBAHAN INVENTORI	3 537 420	3 903 616	3 543 552	1 946 131	603 563
6. NET EKSPOR	109 688 151	102 402 982	94 046 887	63 807 607	62 783 491
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	167 314 214	161 634 301	156 723 064	127 897 432	127 831 314

Lampiran 14. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rupiah)
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	10 043 164	10 595 550	10 942 929	11 156 679	11 422 667
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	183 821	251 430	293 616	315 922	291 844
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	2 616 567	2 936 310	3 041 804	2 741 475	2 469 016
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	36 114 066	35 334 926	36 224 624	35 676 409	33 588 513
5. PERUBAHAN INVENTORI	2 175 142	1 431 169	1 447 673	1 012 948	314 935
6. NET EKSPOR	78 825 405	79 460 915	76 659 977	68 602 873	69 373 869
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	129 958 165	130 010 301	128 610 623	119 506 305	117 460 844

Lampiran 15. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (PERSEN)
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	7,62	5,50	3,28	1,95	2,38
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	4,74	36,78	16,78	7,60	(7,62)
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	3,74	12,22	3,59	(9,87)	(9,94)
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	(0,76)	(2,16)	2,52	(1,51)	(5,85)
5. PERUBAHAN INVENTORI	61,77	(34,20)	1,15	(30,03)	(68,91)
6. NET EKSPOR	7,35	0,81	(3,52)	(10,51)	1,12
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,49	0,04	(1,08)	(7,08)	(1,71)

Lampiran 16. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)
KABUPATEN : KUTAI KARTANEGARA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	6,77	7,70	8,64	11,56	12,47
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	0,12	0,19	0,24	0,34	0,33
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	1,71	2,10	2,64	3,36	3,28
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	23,73	24,24	26,21	33,32	34,33
5. PERUBAHAN INVENTORI	2,11	2,42	2,26	1,52	0,47
6. NET EKSPOR	65,56	63,35	60,01	49,89	49,11
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 17. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rupiah)
KABUPATEN : KUTAI TIMUR

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	4 668 198	5 214 061	5 751 824	6 335 520	6 758 812
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	137 619	185 535	214 237	258 349	259 699
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	1 459 869	1 579 208	1 962 151	2 385 779	2 293 647
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	15 717 321	16 560 561	17 935 671	18 647 564	18 002 642
5. PERUBAHAN INVENTORI	2 496 617	2 245 788	3 693 612	1 492 406	411 875
6. NET EKSPOR	67 629 468	72 626 374	65 472 867	64 379 055	67 195 295
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	92 109 092	98 411 527	95 030 362	93 498 672	94 921 969

Lampiran 18. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rupiah)
KABUPATEN : KUTAI TIMUR

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	4 147 906	4 338 582	4 523 705	4 641 211	4 695 600
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	123 834	157 472	165 193	181 350	166 481
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	1 345 174	1 436 517	1 502 649	1 509 759	1 328 280
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	13 289 179	13 527 580	14 635 151	14 390 518	12 900 474
5. PERUBAHAN INVENTORI	1 805 207	1 173 468	1 996 783	1 262 832	354 545
6. NET EKSPOR	56 841 140	60 097 352	60 673 018	62 719 412	64 349 674
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	77 552 440	80 730 972	83 496 499	84 705 082	83 795 054

Lampiran 19. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (PERSEN)
KABUPATEN : KUTAI TIMUR

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	6,66	4,60	4,27	2,60	1,17
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	4,22	27,16	4,90	9,78	(8,20)
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	(4,94)	6,79	4,60	0,47	(12,02)
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	8,27	1,79	8,19	(1,67)	(10,35)
5. PERUBAHAN INVENTORI	83,20	(35,00)	70,16	(36,76)	(71,92)
6. NET EKSPOR	11,79	5,73	0,96	3,37	2,60
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	11,54	4,10	3,43	1,45	(1,07)

Lampiran 20. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)
KABUPATEN : KUTAI TIMUR

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	5,07	5,30	6,05	6,78	7,12
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	0,15	0,19	0,23	0,28	0,27
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	1,58	1,60	2,06	2,55	2,42
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	17,06	16,83	18,87	19,94	18,97
5. PERUBAHAN INVENTORI	2,71	2,28	3,89	1,60	0,43
6. NET EKSPOR	73,42	73,80	68,90	68,86	70,79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 21. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rupiah)
KABUPATEN : BERAU

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	2 798 901	3 176 751	3 465 262	3 815 726	4 114 226
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	145 435	182 924	210 203	249 339	256 248
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	909 282	1 026 334	1 246 444	1 442 158	1 387 032
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	5 603 053	6 030 840	6 255 664	6 559 039	6 879 459
5. PERUBAHAN INVENTORI	137 707	173 419	231 541	235 054	52 603
6. NET EKSPOR	15 312 762	17 454 011	17 957 749	17 768 550	18 099 376
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	24 907 139	28 044 279	29 366 863	30 069 865	30 788 945

Lampiran 22. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rupiah)
KABUPATEN : BERAU

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	2 452 559	2 603 387	2 700 000	2 773 367	2 832 148
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	133 291	158 838	172 434	190 161	190 229
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	829 105	869 940	903 399	920 790	850 381
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	4 987 840	5 243 478	5 348 492	5 344 386	5 354 768
5. PERUBAHAN INVENTORI	45 080	54 122	61 249	62 022	29 603
6. NET EKSPOR	12 019 377	13 661 708	15 264 101	16 632 527	16 225 146
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	20 467 253	22 591 474	24 449 675	25 923 254	25 482 274

Lampiran 23. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (PERSEN)
KABUPATEN : BERAU

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	9,53	6,15	3,71	2,72	2,12
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	6,98	19,17	8,56	10,28	0,04
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	1,32	4,93	3,85	1,93	(7,65)
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	12,50	5,13	2,00	(0,08)	0,19
5. PERUBAHAN INVENTORI	(1,19)	20,06	13,17	1,26	(52,27)
6. NET EKSPOR	19,43	13,66	11,73	8,96	(2,45)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	15,47	10,38	8,23	6,03	(1,70)

Lampiran 24. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)
KABUPATEN : BERAU

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	11,24	11,33	11,80	12,69	13,36
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	0,58	0,65	0,72	0,83	0,83
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	3,65	3,66	4,24	4,80	4,50
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	22,50	21,50	21,30	21,81	22,34
5. PERUBAHAN INVENTORI	0,55	0,62	0,79	0,78	0,17
6. NET EKSPOR	61,48	62,24	61,15	59,09	58,79
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 25. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rupiah)
KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	2 264 532	2 615 283	2 902 986	3 086 459	3 217 792
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	27 358	32 122	36 877	41 426	43 834
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	680 705	796 315	939 995	1 009 464	1 002 355
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	2 390 029	2 213 788	2 468 104	2 532 636	2 539 339
5. PERUBAHAN INVENTORI	29 525	46 781	56 074	32 181	17 053
6. NET EKSPOR	1 045 239	1 276 714	1 185 424	721 594	736 739
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	6 437 387	6 981 002	7 589 459	7 423 760	7 557 111

Lampiran 26. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rupiah)
KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	1 991 165	2 171 759	2 292 977	2 340 093	2 361 678
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	24 683	27 896	29 174	30 891	30 961
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	623 305	688 379	710 643	672 831	630 888
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	2 095 554	2 002 842	2 173 649	2 149 563	2 035 431
5. PERUBAHAN INVENTORI	20 776	23 008	23 408	23 217	12 651
6. NET EKSPOR	1 015 530	1 287 928	1 143 383	1 163 819	1 291 547
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5 771 012	6 201 814	6 373 235	6 380 413	6 363 156

Lampiran 27. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (PERSEN)
KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	6,98	9,07	5,58	2,05	0,92
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	2,63	13,02	4,58	5,88	0,23
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	(2,01)	10,44	3,23	(5,32)	(6,23)
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	5,66	(4,42)	8,53	(1,11)	(5,31)
5. PERUBAHAN INVENTORI	5,85	10,75	1,74	(0,82)	(45,51)
6. NET EKSPOR	9,44	26,82	(11,22)	1,79	10,97
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,85	7,46	2,76	0,11	(0,27)

Lampiran 28. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)
KABUPATEN : PENAJAM PASER UTARA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	35,18	37,46	38,25	41,58	42,58
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	0,42	0,46	0,49	0,56	0,58
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	10,57	11,41	12,39	13,60	13,26
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	37,13	31,71	32,52	34,12	33,60
5. PERUBAHAN INVENTORI	0,46	0,67	0,74	0,43	0,23
6. NET EKSPOR	16,24	18,29	15,62	9,72	9,75
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 29. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rupiah)
KABUPATEN : MAHAKAM ULU

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	309 244	353 639	395 895	429 253	474 850
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	7 138	9 708	13 080	16 714	19 369
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	129 652	154 979	180 095	227 941	255 476
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	271 306	265 690	317 137	413 448	502 582
5. PERUBAHAN INVENTORI	5 017	7 894	13 348	9 982	6 331
6. NET EKSPOR	803 655	781 570	858 896	850 942	847 391
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1 526 012	1 573 480	1 778 452	1 948 281	2 105 999

Lampiran 30. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rupiah)
KABUPATEN : MAHAKAM ULU

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	274 420	292 848	310 068	321 812	338 638
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	6 774	8 153	9 469	10 972	11 139
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	118 930	132 163	139 091	151 420	157 436
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	234 990	242 375	266 514	311 073	343 483
5. PERUBAHAN INVENTORI	3 767	3 943	4 943	4 030	3 100
6. NET EKSPOR	711 200	679 883	696 445	674 556	669 856
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	1 350 082	1 359 366	1 426 530	1 473 862	1 523 652

Lampiran 31. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (PERSEN)
KABUPATEN : MAHAKAM ULU

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	9,32	6,72	5,88	3,79	5,23
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	2,20	20,35	16,14	15,87	1,52
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	9,50	11,13	5,24	8,86	3,97
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	7,16	3,14	9,96	16,72	10,42
5. PERUBAHAN INVENTORI	(5,94)	4,66	25,36	(18,47)	(23,08)
6. NET EKSPOR	11,63	(4,40)	2,44	(3,14)	(0,70)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	10,06	0,69	4,94	3,32	3,38

Lampiran 32. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)
KABUPATEN : MAHAKAM ULU

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	20,26	22,47	22,26	22,03	22,55
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	0,47	0,62	0,74	0,86	0,92
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	8,50	9,85	10,13	11,70	12,13
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	17,78	16,89	17,83	21,22	23,86
5. PERUBAHAN INVENTORI	0,33	0,50	0,75	0,51	0,30
6. NET EKSPOR	52,66	49,67	48,29	43,68	40,24
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 33. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rupiah)
KOTA : BALIKPAPAN

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	15 440 547	17 337 516	18 958 891	20 327 946	21 806 554
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	227 941	288 381	324 028	408 736	411 398
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	1 995 158	2 268 386	2 657 716	2 882 119	3 090 491
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	24 477 978	25 938 826	28 568 347	30 599 026	32 905 761
5. PERUBAHAN INVENTORI	475 417	658 062	797 609	769 032	273 411
6. NET EKSPOR	16 078 605	17 801 404	20 316 108	19 286 495	21 162 592
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	58 695 646	64 292 573	71 622 701	74 273 354	79 650 206

Lampiran 34. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rupiah)
KOTA : BALIKPAPAN

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	13 584 138	14 382 877	14 884 115	15 306 813	15 616 124
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	205 515	253 318	267 441	296 164	296 284
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	1 812 485	1 967 965	1 978 591	1 980 886	1 815 549
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	21 130 820	21 600 747	22 528 818	22 804 423	23 465 640
5. PERUBAHAN INVENTORI	358 401	406 610	460 627	462 429	201 530
6. NET EKSPOR	26 523 785	27 295 732	28 844 356	29 008 059	31 789 799
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	63 615 144	65 907 250	68 963 949	69 858 774	73 184 926

Lampiran 35. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (PERSEN)
KOTA : BALIKPAPAN

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	7,80	5,88	3,48	2,84	2,02
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	5,12	23,26	5,58	10,74	0,04
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	(5,73)	8,58	0,54	0,12	(8,35)
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	7,07	2,22	4,30	1,22	2,90
5. PERUBAHAN INVENTORI	9,35	13,45	13,28	0,39	(56,42)
6. NET EKSPOR	4,11	2,91	5,67	0,57	9,59
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	5,57	3,60	4,64	1,30	4,76

Lampiran 36. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)
KOTA : BALIKPAPAN

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	26,31	26,97	26,47	27,37	27,38
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	0,39	0,45	0,45	0,55	0,52
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	3,40	3,53	3,71	3,88	3,88
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	41,70	40,34	39,89	41,20	41,31
5. PERUBAHAN INVENTORI	0,81	1,02	1,11	1,04	0,34
6. NET EKSPOR	27,39	27,69	28,37	25,97	26,57
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 37. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rupiah)
KOTA : SAMARINDA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	18 749 480	21 273 993	23 075 743	24 350 805	24 918 558
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	276 234	386 276	459 121	509 998	517 971
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	6 467 314	7 425 479	8 136 038	8 325 600	7 760 528
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	18 287 610	19 792 376	22 064 261	22 193 836	20 388 201
5. PERUBAHAN INVENTORI	1 050 875	1 496 998	1 756 429	966 429	280 425
6. NET EKSPOR	(3 588 696)	(5 550 820)	(7 217 877)	(5 544 300)	(1 599 342)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	41 242 818	44 824 302	48 273 715	50 802 369	52 266 340

Lampiran 38. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rupiah)
KOTA : SAMARINDA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	16 730 424	17 776 060	18 632 592	18 758 247	18 860 579
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	248 761	317 121	352 244	363 361	363 475
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	6 027 536	6 511 754	6 372 002	5 741 502	5 067 210
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	16 137 826	16 836 703	17 924 973	17 299 973	15 826 653
5. PERUBAHAN INVENTORI	714 231	741 373	812 992	547 598	174 514
6. NET EKSPOR	(4 147 205)	(4 711 159)	(4 588 498)	(3 187 458)	(678 328)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	35 711 573	37 471 853	39 506 305	39 523 223	39 614 102

Lampiran 39. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (PERSEN)
KOTA : SAMARINDA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	7,92	6,25	4,82	0,67	0,55
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	3,82	27,48	11,08	3,16	0,03
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	15,73	8,03	(2,15)	(9,89)	(11,74)
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	6,86	4,33	6,46	(3,49)	(8,52)
5. PERUBAHAN INVENTORI	0,50	3,80	9,66	(32,64)	(68,13)
6. NET EKSPOR	(237,68)	(13,60)	2,60	30,53	78,72
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	0,50	4,93	5,43	0,04	0,23

Lampiran 40. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)
KOTA : SAMARINDA

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	45,46	47,46	47,80	47,93	47,68
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	0,67	0,86	0,95	1,00	0,99
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	15,68	16,57	16,85	16,39	14,85
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	44,34	44,16	45,71	43,69	39,01
5. PERUBAHAN INVENTORI	2,55	3,34	3,64	1,90	0,54
6. NET EKSPOR	(8,70)	(12,38)	(14,95)	(10,91)	(3,06)
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Lampiran 41. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (Juta Rupiah)
KOTA : BONTANG

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	3 479 207	3 961 302	4 372 070	4 692 869	4 950 848
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	138 793	174 190	202 501	233 876	226 907
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	764 219	883 804	1 055 503	1 233 946	981 784
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	6 853 203	7 177 219	7 726 545	7 774 448	5 794 078
5. PERUBAHAN INVENTORI	190 522	1 057 463	1 830 329	(106 784)	51 484
6. NET EKSPOR	43 085 570	43 024 101	43 868 365	44 674 348	41 930 707
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	54 511 514	56 278 079	59 055 313	58 502 703	53 935 808

Lampiran 42. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (Juta Rupiah)
KOTA : BONTANG

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	3 070 427	3 281 162	3 413 802	3 484 572	3 539 726
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	124 380	145 042	157 240	169 046	156 715
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	700 993	758 089	767 759	772 580	576 067
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	6 213 401	6 405 905	6 667 291	6 501 302	4 380 788
5. PERUBAHAN INVENTORI	125 898	450 610	743 240	53 158	39 458
6. NET EKSPOR	35 388 646	31 971 528	29 872 801	32 453 899	34 094 175
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	45 623 745	43 012 336	41 622 133	43 434 556	42 786 930

Lampiran 43. LAJU PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA KONSTAN 2010 (PERSEN)
KOTA : BONTANG

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	10,80	6,86	4,04	2,07	1,58
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	2,63	16,61	8,41	7,51	(7,29)
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	11,62	8,14	1,28	0,63	(25,44)
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	2,73	3,10	4,08	(2,49)	(32,62)
5. PERUBAHAN INVENTORI	(222,74)	257,92	64,94	(92,85)	(25,77)
6. NET EKSPOR	(13,20)	(9,66)	(6,56)	8,64	5,05
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	(9,18)	(5,72)	(3,23)	4,35	(1,49)

Lampiran 44. DISTRIBUSI PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO ATAS DASAR HARGA BERLAKU (PERSEN)
KOTA : BONTANG

KOMPONEN	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. KONSUMSI AKHIR RUMAH TANGGA	6,38	7,04	7,40	8,02	9,18
2. KONSUMSI AKHIR LNPRT	0,25	0,31	0,34	0,40	0,42
3. KONSUMSI AKHIR PEMERINTAH	1,40	1,57	1,79	2,11	1,82
4. PEMBENTUKAN MODAL TETAP BRUTO (PMTB)	12,57	12,75	13,08	13,29	10,74
5. PERUBAHAN INVENTORI	0,35	1,88	3,10	(0,18)	0,10
6. NET EKSPOR	79,04	76,45	74,28	76,36	77,74
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

<https://kaltara.bps.go.id>



Badan Pusat Statistik
Provinsi Kalimantan Timur

Jl. Kemakmuran No. 4 Samarinda 75117

Telp.: (0541) 732793, 743372 Faks.: (0541) 201121

email: bps6400@bps.go.id website: <http://kaltara.bps.go.id>

ISBN 978-623-7693-00-0

